



**ANALISIS MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN KREDIT  
(STUDI KASUS PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Dwi Cahya Maharani

021119305

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN**

**FEBRUARI 2024**



**ANALISIS MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN KREDIT  
(STUDI KASUS PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar **Sarjana Manajemen**  
Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis **Universitas Pakuan**  
Bogor

Mengantar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Towaf Totok Irawan, S.E., M.E., Ph.D)



Ketua Program Studi  
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., CA)

**ANALISIS MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN KREDIT  
(STUDI KASUS PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR)**

Skripsi

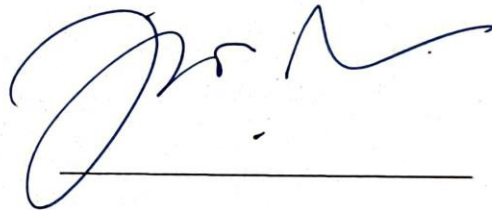
Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Rabu, Tanggal 2 Agustus 2023

Dwi Cahya Maharani

021119305

Menyetujui

Ketua Penguji Sidang  
(Fredri Andria, STp., M.M.)



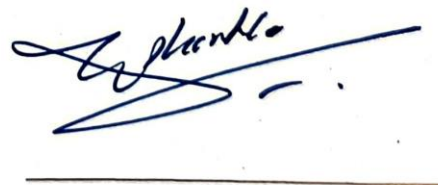
---

Ketua Komisi Pembimbing  
(Oktori Kiswati Zaini, S.E., MM)



---

Anggota Komisi Pembimbing  
(Doni Wihartika, S.Pi., M.M.)



---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Cahya Maharani

NPM : 021119305

Judul Skripsi/Tesis Desertasi : Analisis Mekanisme Pengajuan Pinjaman Kredit  
(Studi Kasus Perumda BPR Bank Kota Bogor)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi/Tesis Desertasi di atas adalah benar hasil karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir penulisan Skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Agustus 2023



Dwi Cahya Maharani  
021119305

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2024  
dilindungi Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan khalayak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

\*) 2024

## ABSTRAK

DWI CAHYA MAHARANI. 021119305. Analisis Mekanisme Pengajuan Pinjaman Kredit (Studi Perumda BPR Bank Kota Bogor). Skripsi Prodi Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Di bawah bimbingan: OKTORI KISWATI ZAINI dan DONI WIHARTIKA. 2023.

Bank memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, hal tersebut tentu tidak terlepas dari perannya sebagai lembaga intermediasi di mana kegiatan utamanya meliputi penghimpunan serta penyaluran dana. Bank Perkreditan Rakyat memiliki keterbatasan dalam hal bertransaksi, tetapi pada kenyataannya Bank Perkreditan Rakyat memiliki peminatnya tersendiri terbukti dengan banyaknya Bank Perkreditan Rakyat yang bermunculan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat cenderung memilih menjadi nasabah di Bank Perkreditan Rakyat karena beberapa alasan, seperti pengajuan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat terbilang lebih mudah, bunga simpanan yang diberikan lebih tinggi, serta kemudahan akses dalam menjangkau layanan dikarenakan Bank Perkreditan Rakyat menyebar di berbagai wilayah termasuk daerah yang terpencil. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan penerapan yang dilakukan BPR Bank Kota Bogor sebagai objek penelitian serta bagaimana pihak BPR menyelesaikan permasalahan kredit macet dalam hal pinjaman.

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan jika jumlah populasi kurang dari 30 informan. Informan yang ada sudah mewakili dalam menganalisis pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara analisis deskriptif *non statistics*. Analisis data bersifat kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan data *collection*, data *reduction*, data *conclusions drawing*, data *displays*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur permohonan pinjaman membutuhkan beberapa bukti diri seperti KTP dan sertifikasi usaha guna menjadi penjamin dan validitas debitur. Selain itu baik nasabah maupun pegawai pihak BPR menyadari bahwa prosedur dan SOP yang telah ditetapkan oleh BPR Bank Kota Bogor dinilai telah sesuai dan penting dilaksanakan guna memperlancar dan menjadikan proses pinjaman aman bagi kedua pihak. Apabila terjadi kredit macet pada saat proses pinjaman, pihak BPR tidak langsung mengambil agunan yang telah disepakati namun melakukan musyawarah dengan debitur guna menemukan alternatif dalam pembayaran.

**Kata Kunci:** Bank Perkreditan Rakyat, Permohonan pinjaman

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN KREDIT (STUDI PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR)”** dengan tepat waktu. Sholawat dan salam penulis curahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW.

Terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari doa kedua orang tua penulis dan juga bantuan, bimbingan, dukungan dan semangat dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan penting membantu menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Amir Hamzah dan Ibu Sumiati penulis lain yang tak pernah henti selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., selaku Rektor Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Enok Rusmanah, SE., M.Acc selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Prof. Dr. Yohanes Indrayono, AK., MM., CA. selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Ibu Oktorini Kiswati Zaini, S.E., M.M selaku Ketua Komisi Pembimbing penulis yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak Doni Wihartika, S.Pi., M.M selaku Anggota Komisi Pembimbing penulis yang membantu membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
9. Ibu Dewi Maharani Purbasari, S.E., M.Si selaku Dosen Wali penulis.
10. Seluruh staff Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
11. Sahabat penulis, Lilis, Ghita, Vena, Marsa, Indar, Alghifari, Tania, Tegar, Ujang, Nabihah, Athaya, Dinda, Fany, Tara, Salwa, Yunita, Ario, Dhiya, Widi, Hamidah, Akbar. Terima kasih atas semangat, masukan, dan hiburan yang selalu diberikan kepada penulis. Semangat menempuh S-1 dan sukses untuk kalian.
12. Kak Balqis dan Chika Silvia, teman penulis yang membantu mengoreksi dan memberikan saran jurnal selama penyusunan proposal ini.
13. Bima Irawan, yang tidak pernah henti selalu memberi support dan bantuan tenaga selama penyusunan skripsi ini.

14. Manajemen kelas I angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga serta selalu memotivasi penulis untuk terus semangat menempuh pendidikan sampai saat ini.
15. Teruntuk Staf Bank Kota Bogor Ibu Lisda, Pak Basri, Pak Cece, Ibu Fuji, Pak Rizky, Ibu Leni, dan Pak Hadi Terima kasih atas segala bantuannya selama proses magang berlangsung.
16. Seluruh jajaran manajer dan para staf di Perumda BPR Bank Kota Bogor.
17. Seluruh pihak yang turut membantu penyusunan skripsi yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengalaman yang penulis miliki masih kurang. Oleh karena itu kritik dan saran yang memotivasi sangat penulis harapkan.

Bogor, Juni 2023



Dwi Cahya Maharani



## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b></b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN &amp; PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PELIMPAHAN HAK CIPTA .....</b>	<b></b>
<b>LEMBAR HAK CIPTA.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	7
1.4.2 Kegunaan Akademik.....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Manajemen Keuangan .....	8
2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan .....	8
2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan.....	8
2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan .....	10
2.2 Analisis .....	11
2.2.1 Pengertian Analisis .....	11
2.3 Bank.....	12
2.3.1 Pengertian Bank .....	12
2.3.2 Jenis-Jenis Bank.....	13
2.3.3 Kegiatan-Kegiatan Bank.....	15
2.3.4 Sumber Dana Bank .....	16

2.4 Bank Perkreditan Rakyat .....	18
2.4.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat .....	18
2.5 Mekanisme .....	18
2.5.1 Pengertian Mekanisme .....	18
2.6 Kredit .....	19
2.6.1 Pengertian Kredit .....	19
2.6.2 Unsur-Unsur Kredit .....	19
2.6.3 Tujuan Kredit .....	20
2.6.4 Jenis-Jenis Kredit .....	21
2.6.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit .....	22
2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	24
2.7.1 Penelitian Sebelumnya .....	24
2.7.2 Kerangka Pemikiran .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	28
3.2 Objek, Unit, Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	28
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	28
3.3.1 Jenis Data .....	28
3.3.2 Sumber Data .....	28
3.4 Metode Penarikan Sampel .....	29
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	30
3.5.1 Data Primer .....	30
3.6 Uji Keabsahan Data .....	31
3.6.1 Uji Kredibilitas .....	31
3.6.2 Uji <i>Transferability</i> .....	31
3.6.3 Uji <i>Dependability</i> .....	32
3.6.4 Uji <i>Confirmability</i> .....	32
3.7 Metode Pengolahan Analisis Data .....	32
3.7.1 Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum Perumda BPR Bank Kota Bogor .....	35
4.1.1 Lokasi Perumda BPR Bank Kota Bogor .....	35
4.1.2 Visi dan Misi Perumda BPR Bank Kota Bogor .....	36
4.1.3 Struktur Organisasi Perumda BPR Bank Kota Bogor .....	37
4.2 Profil Informan .....	41
4.3.1 Data <i>Collection</i> .....	45
4.3.2 Data <i>Reduction</i> .....	53
4.3.3 Data <i>Display</i> .....	56

4.4 Uji Keabsahan Data .....	63
4.4.1 Uji Kredibilitas.....	63
4.4.2 Uji <i>Confirmability</i> .....	64
4.5 Pembahasan.....	65
4.5.1 Mekanisme Pengajuan Kredit Pada Perumda BPR Bank Kota Bogor	65
4.5.2 Analisis Mekanisme Pengajuan Kredit Perumda BPR Bank Kota Bogor	69
<b>BAB V_SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
5.1 Simpulan .....	74
5.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengajuan dan Penerima Pinjaman Kredit .....	4
Tabel 1.2 Laporan NPL BPR Bank Kota Bogor Tahun 2020-2022 .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya .....	24
Tabel 3.1 Informan Penelitian Pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor .....	29
Tabel 3.2 Informan Penelitian Nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor .....	29
Tabel 4. 1 Data Hasil Wawancara Informan .....	46
Tabel 4. 2 Hasil Reduksi Wawancara .....	53
Tabel 4. 3 Pernyataan Informan Penelitian .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	27
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data .....	33
Gambar 4.1 Peta Lokasi Perumda BPR Bank Kota Bogor .....	35
Gambar 4.2 Peta Satelit Perumda BPR Bank Kota Bogor.....	36
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Perumda BPR Bank Kota Bogor.....	37
Gambar 4.4 Diagram Karakteristik Informan Pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Usia .....	41
Gambar 4.5 Diagram Karakteristik Informan Nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Usia .....	42
Gambar 4.6 Karakteristik Informan Pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Domisili.....	42
Gambar 4.7 Karakteristik Informan Nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Domisili.....	43
Gambar 4.8 Karakteristik Informan Pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Jenis Kelamin .....	43
Gambar 4.9 Diagram Karakteristik Informan Nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
Gambar 4.10 Diagram Karakteristik Informan Pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Lama Bekerja .....	44
Gambar 4.11 Karakteristik Informan Nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Lama Bekerja .....	45
Gambar 4.12 Pernyataan Responden Berdasarkan Penting dan Tidak Penting.....	57
Gambar 4.13 Pernyataan Responden Berdasarkan Mengetahui dan Tidak Mengetahui .....	57
Gambar 4.14 Pernyataan Responden Berdasarkan Sudah Sesuai dan Belum Sesuai	58
Gambar 4.15 Pernyataan Responden Berdasarkan Sesuai atau Tidak Sesuai Mengenai Penjelasan Persyaratan Kredit.....	58
Gambar 4.16 Pernyataan Responden Berdasarkan Benar atau Tidak Benar Mengenai Penjelasan Persyaratan Kredit.....	59
Gambar 4.17 Pernyataan Responden Mengenai Kunjungan Survey Lapangan .....	59
Gambar 4.18 Pernyataan Responden Mengenai Pengawasan Kredit .....	60
Gambar 4.19 Diagram Pernyataan Responden Mengenai Surat Teguran.....	61
Gambar 4.20 Diagram Pernyataan Responden Mengenai Tindakan Tegas Perumda BPR Bank Kota Bogor .....	61
Gambar 4.21 Diagram Pernyataan Kesesuaian Mekanisme Kredit .....	62
Gambar 4.22 Diagram Pernyataan Responden Mengenai Penanganan Risiko Kredit Macet.....	63
Gambar 4.23 Flow Chart Mekanisme Pengajuan Kredit .....	65
Gambar 4.24 Flow Chart Pengawasan Kredit.....	71
Gambar 4.25 Flowchart Mengatasi Kredit Macet.....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	81
Lampiran 2 Transkrip Wawancara .....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia saat ini memiliki berbagai masalah yang perlu diselesaikan, salah satu masalahnya mengenai perekonomian. Keterbatasan ekonomi merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Tahun 2019 sebuah wabah penyakit yaitu covid-19 menyerang berbagai sektor penduduk di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, perekonomian Indonesia pun ikut terdampak atas musibah yang terjadi menyebabkan perekonomian Indonesia melesat jauh mengalami penurunan drastis akibat perkembangan ekonomi yang kurang stabil.

Menurut Kasmir (2018), bank memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, hal tersebut tentu tidak terlepas dari perannya sebagai lembaga intermediasi di mana kegiatan utamanya meliputi penghimpunan serta penyaluran dana. Peran tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara garis besar bank menerima dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus) dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro dan deposito, kemudian bank akan menyalurkannya kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (defisit) dalam bentuk pemberian kredit.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berdasarkan fungsinya Bank dikategorikan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan tersebut diantaranya yaitu jangkauan Bank Umum lebih luas sementara jangkauan Bank Perkreditan Rakyat terbatas pada Kota/Kabupaten, maka oleh karena itu Bank Perkreditan Rakyat tidak melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti yang tersedia pada Bank Umum. Produk atau layanan yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat tidak sebanyak yang ditawarkan oleh Bank Umum, contohnya yaitu tidak tersedianya produk simpanan berupa giro, tidak tersedianya layanan asuransi dan jual beli valuta asing.

Bank Perkreditan Rakyat memiliki keterbatasan dalam hal bertransaksi, tetapi pada kenyataannya Bank Perkreditan Rakyat memiliki peminatnya tersendiri terbukti dengan banyaknya Bank Perkreditan Rakyat yang bermunculan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat cenderung memilih menjadi nasabah di Bank Perkreditan Rakyat karena beberapa alasan, seperti pengajuan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat terbilang lebih mudah, bunga simpanan yang diberikan lebih tinggi, serta

kemudahan akses dalam menjangkau layanan dikarenakan Bank Perkreditan Rakyat menyebar di berbagai wilayah termasuk daerah yang terpencil.

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kota Bogor (BUMD) yang bergerak dibidang perbankan yang berlokasi di Jl. Re. Martadinata No.45, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang pendir

Lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor.

Sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah, Perumda BPR Bank Kota Bogor bertugas menyelenggarakan pelayanan dalam bidang jasa perbankan kepada masyarakat (PNS, Karyawan, Pensiunan, UMKM) yang berada di wilayah Kota Bogor, selain itu memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperoleh laba atau keuntungan. Sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan Perumda BPR Bank Kota Bogor adalah mewujudkan perkembangan usaha yang sehat dan efisien, dalam arti dapat memenuhi kepentingan masyarakat baik penyimpanan maupun penyaluran dana yang mampu berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi perkembangan ekonomi daerah.

Hadirnya Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dapat berperan membantu mengatasi masalah-masalah perekonomian, terutama masalah keterbatasan modal pada pengusaha mikro kecil dan menengah. Salah satu cara penyaluran dana tersebut adalah melalui kebijakan kredit yang dilakukannya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan kredit adalah penyediaan dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Peran pemberian kredit sangat penting terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini yaitu untuk mengembangkan ekonomi di setiap daerah dengan cara memberikan kredit sebagai modal kerja guna memenuhi kebutuhan konsumsi, perluasan usaha, atau guna mendirikan suatu proyek baru. Kredit dibutuhkan bagi masyarakat karena memberikan kemudahan bagi calon debitur untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau kebutuhan usaha dengan jangka waktu yang dapat disesuaikan pada sistem di Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Mekanisme pemberian kredit pada Perumda BPR Bank Kota Bogor tentu meliputi beberapa tahapan, setelah mendapatkan nasabah yang prospek, pihak bank



masih perlu melakukan berbagai analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis jaminan, dan trade checking atau sliik idem yang semuanya perlu dilakukan guna meminimalisir risiko. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk *Know Your Customer (KYC)* yang dilakukan BPR Bank Kota bogor terhadap nasabahnya. Tersedianya prosedur dan persyaratan yang jelas membuat BPR Bank Kota Bogor dapat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi sebagai pemberi kredit (kreditur), salah satu risiko yang umum terjadi yaitu kredit macet. Risiko yang terjadi patut dihindari atau dikelola dengan optimal agar BPR Bank Kota Bogor dapat beroperasi dengan efektif dan efisien sebagaimana mustinya, oleh karena itu BPR Bank Kota Bogor melaksanakan mekanisme pemberian kredit dan menganalisis kelayakan calon penerima kredit (debitur) dengan sebaik mungkin.

Penyaluran kredit yang dilakukan perbankan tentu akan menghadapi beberapa risiko kemungkinan tidak tertagih. Guna meminimalisir kemungkinan tidak tertagih. Menurut Galih (2009) bank menerapkan prinsip 5C dalam pemberian kredit, seperti *Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition*. Atas prinsip 5C tersebut, collateral atau jaminan termasuk dalam kategori yang sangat penting dalam pemberian kredit. Adanya jaminan yang diberikan maka risiko kredit macet menjadi lebih rendah. Tak hanya itu, walaupun calon debitur memberikan jaminan pihak bank akan menyeleksi setiap pengajuan kredit yang masuk. Jaminan akan diseleksi kembali oleh pihak analis dilihat dari segi legalitas dan marketable dari jaminan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar risiko tidak tertagihnya piutang dapat di tekan menjadi lebih rendah (Farisi & Saifi, 2016).

Tahun 2021 jumlah pengajuan dan penerima kredit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2022 pengajuan dan penerima kredit mengalami penurunan. Berikut merupakan tabel jumlah data penerima dan jumlah data pengajuan pinjaman Perumda BPR Bank Kota Bogor:

**Tabel 1.1 Jumlah Pengajuan dan Penerima Pinjaman Kredit**

No	Bulan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah Pengajuan Pinjaman	Jumlah Penerima Pinjaman	Jumlah Pengajuan Pinjaman	Jumlah Penerima Pinjaman	Jumlah Pengajuan Pinjaman	Jumlah Penerima Pinjaman
1	Januari	185	185	109	109	126	126
2	Februari	265	265	147	147	126	126
3	Maret	187	187	1421	1421	106	106
4	April	121	121	96	96	144	144
5	Mei	90	90	70	70	54	54
6	Juni	119	119	73	73	81	81
7	Juli	123	123	90	90	68	64
8	Agustus	106	106	87	87	122	105
9	September	97	97	123	123	118	100
10	Oktober	102	102	87	87	110	94
11	November	141	141	94	94	123	117
12	Desember	59	59	164	164	133	125
<b>Total</b>		<b>1595</b>	<b>1595</b>	<b>2561</b>	<b>2561</b>	<b>1311</b>	<b>1242</b>

Sumber: Laporan Kredit BPR Bank Kota Bogor

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas yang berisi jumlah pengajuan dan penerima pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah pengajuan dan penerima kredit sebanyak 1.595 nasabah. Tahun 2021 jumlah nasabah yang mengajukan dan yang menerima kredit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 2.561 nasabah. Tahun 2022 jumlah pengajuan dan penerima kredit mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2022 jumlah pengajuan kredit yang masuk sebanyak 1.311 pengajuan, sedangkan penerima kredit yang diterima hanya sebanyak 1.242 nasabah. Penulis melihat penurunan tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2022, yang dimana jumlah pengajuan dengan jumlah penerima kredit itu berbeda. Hal tersebut terjadi, disebabkan karena Perumda BPR Bank Kota Bogor baru menjalankan analisis kredit pada bulan juli tahun 2022.

Kredit Bermasalah atau (*Non Performing Loan*) merupakan rasio yang digunakan bank untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Dendawijaya, 2005). *Non Perfoming Loan* sangat mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL maka semakin kecil risiko yang dihadapi pihak bank begitu sebaliknya. Berikut merupakan tabel laporan NPL BPR Bank Kota Bogor selama 3 tahun, sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Laporan NPL BPR Bank Kota Bogor Tahun 2020-2022**

No	Bulan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Baki Debet	%	Baki Debet	%	Baki Debet	%
1	Januari	4.535.700.700	3,36%	5.847.489.947	4,18%	7.008.957.951	4,73%
2	Februari	4.503.882.300	3,25%	5.998.231.347	4,24%	7.341.813.386	4,88%
3	Maret	4.539.170.500	3,24%	5.680.106.247	3,94%	7.430.163.729	4,96%
4	April	4.323.913.200	3,08%	5.831.889.247	3,97%	10.273.480.765	6,69%
5	Mei	5.752.595.957	4,13%	6.109.811.496	4,21%	10.527.914.013	6,90%
6	Juni	5.186.465.900	3,69%	7.504.860.596	5,17%	10.242.159.691	6,73%
7	Juli	4.836.058.300	3,46%	7.473.334.495	5,11%	11.891.765.838	7,92%
8	Agustus	4.961.543.100	3,52%	7.415.712.933	5,07%	10.325.285.880	6,84%
9	September	4.970.869.700	3,53%	6.634.831.803	4,51%	12.464.037.569	8,25%
10	Oktober	5.194.852.765	3,71%	6.554.474.717	4,50%	11.811.334.518	7,84%
11	November	5.257.404.642	3,72%	6.493.875.538	4,54%	12.771.892.932	8,29%
12	Desember	5.310.436.942	3,81%	6.479.518.487	4,36%	12.967.808.595	8,15%
<b>Total</b>		<b>59.372.894.006</b>	<b>42,50%</b>	<b>78.024.136.853</b>	<b>53,80%</b>	<b>125.056.614.867</b>	<b>82,18%</b>
Rata-rata		3,54%		4,48%		6,85%	

*Sumber: Laporan NPL BPR Bank Kota Bogor*

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas yang berisi laporan *Non Performing Loan* (NPL), dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 persentase NPL atau kredit bermasalah rata-rata sebesar 3,54%, tentu pada tahun 2020 tingkat kesehatan pada bank ini masih cukup baik karena masih dibawah batasan persentase 5% yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Tahun 2021 rata-rata persentase NPL sedikit meningkat yaitu sebesar 4,48% yang artinya masih bisa dikatakan bahwa kesehatannya masih cukup baik, tetapi pada bulan juni, juli, dan agustus persentase NPL tahun 2021 mengalami peningkatan melebihi 5%, sedangkan tahun 2022 persentase NPL mengalami peningkatan drastis, NPL pada tahun ini naik secara signifikan melebihi dari batasan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yaitu sebesar 5% yang artinya pada tahun 2022 Perumda BPR Bank Kota Bogor termasuk dalam kategori tidak sehat.

Nilai kredit yang besar akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pihak bank. Tak bisa dipungkiri bahwa semakin besar keuntungan yang diharapkan dari suatu usaha, maka akan semakin besar risiko yang dihadapi. Mengantisipasi terjadinya berbagai risiko buruk yang terjadi, pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor menjalankan mekanisme dalam pengajuan pinjaman kredit oleh karena itu, adanya fenomena analisis tidak hati-hati dalam pemberian kredit dan kredit macet yang dilihat dari persentase NPL yang melebihi batasan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebesar 5%, penulis tertarik untuk Menganalisis Mekanisme Pengajuan Pinjaman Pada Perumda BPR Bank Kota Bogor, karena bank tersebut masih belum menjalankan mekanisme pemberian pinjaman dengan optimal. Penulis

akan lebih berfokus melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN KREDIT (STUDI KASUS PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR)**”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari paparan pada latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah seperti prosedur dan penyaluran kredit dari Perumda BPR Bank Kota Bogor. Maka Permasalahan penelitian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mekanisme pengajuan kredit masih belum berfungsi optimal karena analisis kredit baru berjalan pada bulan Juli 2022.
2. Pihak analisis masih tidak hati-hati dalam pemberian kredit karena besaran persentase NPL 5% melebihi batasan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan kredit yang berlaku Pada Perumda BPR Bank Kota Bogor?
2. Bagaimana mekanisme pengajuan kredit yang dilakukan Perumda BPR Bank Kota Bogor?
3. Bagaimana cara Perumda BPR Bank Kota Bogor mengatasi permasalahan risiko kredit macet?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kebijakan dalam mekanisme pengajuan pinjaman kredit. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan kredit sehingga masukan tersebut dapat diimplementasikan perusahaan untuk perbaikan mekanisme pengajuan pinjaman kredit pada Perumda BPR Bank Kota Bogor agar lebih hati-hati dalam pemberian kredit kepada calon kreditur.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mekanisme pengajuan kredit yang berlaku pada BPR Bank Kota Bogor.

2. Menganalisis mekanisme pengajuan kredit yang dilakukan Perumda BPR Bank Kota Bogor.
3. Untuk menjelaskan cara Perumda BPR Bank Kota Bogor mengatasi permasalahan risiko kredit macet.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian dapat menjadi pengetahuan sehingga bagi masyarakat ilmiah maupun akademis dapat mempelajari penelitian ini untuk dijadikan sebagai pengetahuan atau referensi.
2. Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang mendukung dalam mengetahui mengenai pengendalian kredit dalam upaya menciptakan bank yang sehat dan dapat juga sebagai bahan kajian lainnya.
3. Penelitian diharapkan dapat memberi masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan kredit yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengambil langkah yang tepat guna meningkatkan kebijaksanaan dalam prosedur pengajuan kredit.

##### **1.4.2 Kegunaan Akademik**

1. Bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dan dapat menjadi informasi yang bermanfaat tentang prosedur pengajuan kredit, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Penelitian diharapkan dapat memberikan kajian konseptual tentang bagaimana mekanisme pengajuan pinjaman kredit.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Manajemen Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan**

Menurut Purba et al., (2021) manajemen keuangan merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian keuangan seperti, penyediaan dan pemanfaatan dana usaha.

Menurut Kariyoto (2018) manajemen keuangan adalah integrasi dari pengetahuan dan seni yang menganalisa serta mencermati tentang upaya seorang manajer keuangan dengan menggunakan semua sumber daya manusia perusahaannya untuk mencari, mengelola dan membagi pendanaan (*funding*) dengan tujuan mampu memberikan kesejahteraan (*welfare*) atau laba bagi para investor dan keberlanjutan bisnis bagi entitas ekonomi.

Menurut Irfani (2020), manajemen keuangan dapat diartikan sebagai kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan mengelola dana dengan efektif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Astawinetu dan Handini (2020) manajemen keuangan ialah tentang bagaimana sebuah manajemen berfungsi memperoleh dana (*rising of funds*) dan bagaimana menggunakan dana (*allocation of funds*).

Menurut Fahmi (2018), manajemen keuangan merupakan penggabungan ilmu dan seni yang mengkaji, membahas, serta menganalisis bagaimana seorang manajer keuangan mempergunakan seluruh Sumber Daya Manusia perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan mmebagi dana dengan tujuan mampu memberikan laba atau menjanjikan kemakmuran bagi para pemegang saham dan *suistainability* (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.

Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli diatas, dapat penulis sintesakan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan perusahaan yang mencakup keputusan dan kemampuan para manajemen yang berkaitan tentang bagaimana memperoleh dana (*rising of funds*), menggunakan dana (*allocation of funds*), dan bagaimana mengelola dana atau aset dalam bentuk investasi secara efektif dan efisien guna menciptakan nilai ekonomi agar tujuan perusahaan tercapai. Dalam penelitian ini keuangan yang dimaksud adalah pinjaman kredit yang menjadi kunci utama dalam manajemen keuangan di Perumda BPR Bank Kota Bogor.

##### **2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan**

Setiap manajemen keuangan dalam perusahaan memiliki hubungan keterkaitan dengan bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas dan memiliki keputusan dengan

cara memperoleh dana atau aset dan mengalokasikan nya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini manajemen perusahaan pastinya memiliki fungsi utama agar setiap aktivitas serta kegiatannya tidak menyimpang dengan tujuan perusahaan.

Ilmu manajemen keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengambil keputusan (manajer) yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah yang berlaku.

Irfani (2020) mengungkapkan pernyataannya bahwa, ada tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu:

- 1) Fungsi Pendanaan: merupakan sebuah aktivitas mencari dan memperoleh dana suntikan dana yang nantinya akan dialokasikan untuk pengerjaan proyek atau program dari sebuah perusahaan atau biasa disebut *funding*.
- 2) Fungsi Operasional: dalam praktiknya, fungsi operasional mengacu pada strategi yang digunakan dalam penataan dan administrasi pada perusahaan agar efektivitas perusahaan berjalan secara maksimal.
- 3) Fungsi Investasi: mengacu kepada pengaitan sumber-sumber dana dalam jangka panjang untuk mendapatkan profit di masa mendatang atau di waktu tertentu.

Fungsi manajemen keuangan menurut Kariyoto (2018) yaitu sebagai keputusan alokasi pendanaan baik dana dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan, manajemen keuangan juga berfungsi sebagai keputusan pendanaan investasi dan juga sebagai kebijakan dividen dimana manajer keuangan memutuskan untuk membagikan laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan kepada pemegang saham (investor) dalam bentuk dividen atau sebaiknya ditahan dalam bentuk laba ditahan.

Sedangkan menurut Sujarweni (2019) manajemen keuangan mempunyai dua fungsi utama yakni, sebagai keputusan investasi yang merupakan keputusan mengenai aset yang akan dikelola perusahaan. Kedua, keputusan pendanaan yang menyangkut sumber dana yang akan dipergunakan dalam membiayai investasi yang dianggap layak.

Menurut Musthafa (2017) menyatakan manajemen keuangan memiliki fungsi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Fungsi Pengendalian Likuiditas
  - a) Perencanaan aliran kas (*forecasting cash flow*) agar ketersediaan uang kas selalu tersedia guna memenuhi pembayaran agar tercukupi.
  - b) Pencarian dan (*raising of funds*) dari luar maupun dalam perusahaan, tujuannya agar memperoleh dana yang biayanya lebih murah serta tersedianya dana saat di butuhkan.

- c) Menjaga jalinan hubungan baik dengan lembaga keuangan (seperti perbankan) tujuannya guna mencukupi kebutuhan dana apabila diperlukan oleh perusahaan.

## 2. Fungsi Pengendalian Laba

- a) Pengendalian biaya (*cost control*) bertujuan untuk menghindari biaya yang tidak diperlukan atau menghindari pemborosan.
- b) Penentuan harga (*pricing*), agar harga tidak terlalu mahal dibandingkan dengan harga barang yang sejenis dengan milik pesaing.
- c) Perencanaan keuntungan (*profit planning*), agar keuntungan yang diperoleh dapat diprediksi pada periode tertentu sehingga dapat merencanakan aktivitas yang lebih baik periode mendatang.

## 3. Fungsi Manajemen

- a) Dalam pengendalian laba atau likuiditas, manajer keuangan harus bertindak sebagai manajer dan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) sehingga manajer keuangan dapat mengambil langkah-langkah keputusan yang menghasilkan deviden bagi perusahaan.
- b) Manajemen memiliki fungsi seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) yang sangat diperlukan bagi seorang manajer keuangan.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai fungsi dari manajemen keuangan dari para ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa fungsi manajemen keuangan yaitu meliputi dari beberapa fungsi, yaitu fungsi pendanaan, fungsi operasional, fungsi pengendalian laba dan juga fungsi investasi. Dalam penelitian ini fungsi dari manajemen keuangan yaitu mengenai fungsi pendanaan dan juga operasional mengenai pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor.

### 2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan tiap perusahaan tentu memiliki beberapa tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Tujuan manajemen keuangan yaitu dapat meningkatkan profit dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Berikut beberapa tujuan manajemen keuangan menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Kasmir (2009) manajemen keuangan memiliki tujuan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. *Profit Risk Approach*, dalam hal ini manajer keuangan tidak hanya mengejar maksimalisasi profit, akan tetapi juga perlu mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi, bukan tidak mungkin harapan profit yang besar tidak tercapai akibat risiko yang dihadapi juga besar. Dalam hal ini manajer keuangan juga perlu terus



melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang dijalankan menggunakan prinsip kehati-hatian. Secara garis besar yang dimaksud *Profit Risk Approach* terdiri dari:

- a) Maksimalisasi keuntungan;
- b) Minimalisasi risiko;
- c) Pengendalian perbaikan; dan
- d) Cermat dalam aktivitas pengelolaan dana

2. *Liquidity and profitability*, adalah aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Dalam hal likuiditas, manajer keuangan perlu menyanggupi kesediaan dana (uang kas) guna membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan tepat pada waktunya. Manajer keuangan juga dituntut agar mampu mengelola keuangan perusahaan, sehingga mampu meningkatkan deviden perusahaan dari waktu ke waktu.

Kariyoto (2018), menyatakan bahwa tujuan manajer keuangan yaitu, untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik saham dengan mengoptimalkan nilai saat ini dan semua laba pemilik saham yang diinginkan akan didapat di masa datang, sedangkan Sujarweni (2019) mengungkapkan bahwa, tujuan manajemen keuangan secara umum adalah memaksimalkan nilai perusahaan serta meningkatkan kemakmuran investor atau para pemegang saham.

Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli diatas tentang tujuan manajemen keuangan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari manajemen keuangan yaitu bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham agar, jika tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik, maka dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang baik pula. Dalam penelitian ini tujuan dari manajemen keuangan yaitu terkait dengan tujuan mekanisme pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor mengenai memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham jika tujuannya tercapai.

## **2.2 Analisis**

### **2.2.1 Pengertian Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Analisis atau analisa adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”

Menurut Harahap dalam (Azwar, 2019) Pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil. Sedangkan menurut Kurniawan (2015), dalam linguistik, analisis (analisa) adalah studi tentang bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur bahasa. Analisis bisa di artikan sebagai kajian

yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.

Selain itu menurut Wiradi dalam Kurniawan (2015) mengungkapkan bahwa, analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk dikelompokkan sesuai dengan kriteria tertentu lalu dicari dan ditaksir makna serta kaitannya.

Menurut Sugiono (2015), Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan.

Berdasarkan teori dan pendapat para ahli diatas mengenai pengertian analisis, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu aktivitas untuk menemukan temuan baru terhadap objek yg akan diteliti oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yg akurat pada suatu objek.

Pada penelitian ini analisis dilakukan terhadap mekanisme pemberian pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor yang dapat dijadikan dasar keputusan dan pengambilan kebijakan mengenai pengajuan pinjaman kredit.

## **2.3 Bank**

### **2.3.1 Pengertian Bank**

Menurut Kasmir (2018) bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut B.N. Ajuha (2017), bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.

Sementara menurut Sesiady et al., (2018), bank merupakan penyedia bermacam layanan financial yang salah satunya adalah layanan penyaluran kredit modal kerja

Menurut Yulisari et al., (2021) mengemukakan pendapatnya bahwa, bank diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penyimpan dan penyalur dana bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sumarna et al., (2019) memberikan pernyataannya bahwa, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk layanan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan ini memberikan fasilitas bagi pihak yang memiliki dana lebih dan pihak yang memiliki dana yang kurang serta mempermudah transaksi pembayaran.

Menurut Hermansyah (2020), Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya”.

Berdasarkan definisi bank menurut para ahli diatas, penulis dapat simpulkan bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang aktivitas umumnya menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat, karena bank berperan sebagai lembaga *Financial Intermediary* antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2018) mengemukakan pendapatnya bahwa, dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Jika dilihat dari jenis perbankan sebelum terciptanya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan, namun kegiatan utama bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Adapun jenis-jenis bank dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

#### 1. Jenis Bank Dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum
2. Bank Pembangunan
3. Bank Tabungan
4. Bank Pasar
5. Bank Desa
6. Lumbung Desa
7. Bank Pegawai

Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang sebelumnya maka jenis perbankan terdiri dari:

#### a) Bank Umum

Bank umum ialah bank komersial (*Commercial Banking*) yang menjalankan seluruh kegiatannya dengan cara konvensional atau dengan berdasarkan pada prinsip syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat ialah bank yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya secara konvensional atau juga berdasarkan pada prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam hal lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Dari Segi Kepemilikannya

Kepemilikan dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Adapun jenis bank yang bersangkutan, antara lain:

a) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah yaitu bank yang akta pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh laba yang didapat bank ini dimiliki oleh pemerintah. Seperti, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

b) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional yang dapat diketahui dari akta pendiriannya yang didirikan oleh swasta. Seperti, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Permata, dan bank swasta lainnya.

c) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi ialah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Seperti, Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d) Bank Milik Asing

Bank milik asing ialah bank milik swasta asing atau pemerintah asing yang beroperasi di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Seperti, *City Bank*, *Bangkok Bank*, *Deutsche Bank*.

e) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran ialah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional dan mayoritas kepemilikan saham dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Jenis Bank Dari Segi Status

Kedudukan atau status jenis bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh sebab itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-

penilaian dengan kriteria tertentu. Adapun jenis bank dilihat dari segi status, antara lain sebagai berikut:

a) Bank Devisa

Bank devisa ialah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Seperti, transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveler cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

b) Bank Non-Devisa

Bank non devisa ialah bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan kebebasan bertransaksi karena bank non devisa masih dalam batas-batas negara.

#### 4. Jenis Bank Dari Segi Menentukan Harga

Adapun jenis bank berdasarkan cara menentukan harga, antara lain sebagai berikut:

a. Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

1. Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti, giro, tabungan, ataupun deposito. Harga produk pinjaman juga ditetapkan dengan merujuk pada tingkat suku bunga tertentu.
2. Pada jasa lainnya, pihak perbankan menggunakan biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

b. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah ialah bank yang segala peraturan perjanjiannya didasari oleh hukum Islam antara pihak bank tersebut dengan pihak lain, untuk keperluan penyimpanan dana dan juga pembiayaan usaha serta kegiatan perbankan lainnya. Bank yang berorientasi pada prinsip syariah menentukan harga atau memperoleh profit dengan cara, antara lain:

1. Mudharabah, akad kerja sama antara dua pihak namun, bila mengalami kerugian maka pemilik modal yang menanggungnya selama kerugian tidak disebabkan oleh pengelolanya.
2. Musyarakah, akad kerja sama antara dua pihak, dimana masing-masing pihak menanamkan modalnya dengan kesepakatan untung dan rugi ditanggung bersama.
3. Murabahah, prinsip jual beli barang dengan tujuan untuk mendapatkan untung.
4. Ijarah, pembiayaan barang modal dengan sewa murni tanpa ada pilihan.
5. Ijarah wa iqtina, pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

### 2.3.3 Kegiatan-Kegiatan Bank

Menurut Kasmir (2018) mengenai kegiatan bank, dalam pelaksanaan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum cakupannya lebih luas dibandingkan dengan bank perkreditan rakyat. Produk yang ditawarkan bank umum lebih beragam, hal itu

disebabkan karena bank umum memiliki kebebasan dalam menentukan produk dan jasa, sedangkan bank perkreditan rakyat memiliki keterbatasan dalam kegiatannya.

Menurut Kasmir (2018) kegiatan bank memiliki beberapa kegiatan, yang meliputi:

1. Kegiatan Usaha Bank Umum
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan.
  - b. Menyalurkan dana kepada masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit berupa investasi, modal kerja, dan perdagangan.
  - c. Memberikan pelayanan jasa bank seperti transfer, inkaso, kliring, *safe deposit box*, *bank card*, valuta asing, bank garansi, *letter of credit*, dan jual beli surat-surat berharga.
  - d. Menerima pembayaran tagihan seperti pajak, telepon, air, listrik, dan pembayaran uang kuliah.
  - e. Memberikan jasa-jasa di pasar modal berupa penjamin seperti, emisi, penjamin, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek, dan perusahaan pengelola dana.
  - f. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
2. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat
  - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito.
  - b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit berupa investasi, modal kerja, dan perdagangan.

#### **2.3.4 Sumber Dana Bank**

Menurut Kasmir (2018), sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam mendapatkan dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, sumber-sumber dana bank tersebut adalah:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Pihak kesatu)
 

Sumber dana pihak kesatu ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri merupakan setoran modal dari para pemegang sahamnya, dan disebut dana pihak kesatu dikarenakan dari pemegang saham atau pemilik. Modal sendiri dapat berasal dari:

  - a. Setoran modal dari pemegang saham
 

Setoran modal dari pemegang saham merupakan modal dari para pemegang saham lama maupun pemegang saham yang baru.
  - b. Cadangan-Cadangan Bank
 

Cadangan laba bank adalah cadangan laba tahun lalu yang tidak digunakan maupun dibagikan pada pemegang saham guna mengantisipasi laba pada tahun yang akan datang.
  - c. Laba Bank Belum Dibagi

Laba yang dihasilkan pada tahun lalu yang belum dibagikan pada pihak yang bersangkutan, sehingga sumber laba tersebut sementara waktu dapat dimanfaatkan sebagai modal.

2. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Dana pihak kedua)

Sumber dana pihak kedua merupakan sumber dana yang diperoleh dari tambahan dana, jika pihak bank mengalami kesulitan dalam menghimpun sumber dana dari pihak pertama dan ketiga. Sumber dana pihak kedua sifatnya hanya sementara waktu saja atau bisa dikatakan sumber dana ini digunakan jika bank mengalami kesulitan perolehan dana. Sumber dana pihak kedua ini dapat diperoleh dari:

- a) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, adalah kredit yang diberikan oleh bank indonesia kepada bank umum dan bank perkreditan rakyat dalam rangka menunjang program pemerintah dalam membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
- b) Pinjaman antarbank (*Call Money*), pinjaman untuk memenuhi kebutuhan menutup kliring (karena kalah kliring) atau untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan saldo Giro Wajib Minimum (GWM) pada bank indonesia. Pinjaman ini memiliki jangka waktu yang relatif singkat dengan menggunakan sertifikat deposito, dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dengan beban bunga yang cukup tinggi.
- c) Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman jangka menengah panjang yang pinjamannya harus dengan persetujuan dari Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter dan merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak luar negeri.
- d) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pihak bank untuk diperjualbelikan. Surat Berharga Pasar Uang ini adalah surat jaminan pelunasan utang nasabah kepada pihak bank, yang kemudian menjadi hak pihak bank untuk memperdagangkannya di pasar uang.

3. Dana yang bersumber dari masyarakat luas (Dana pihak ketiga)

Sumber dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana yang berperan penting pada kegiatan operasional bank, dan menjadi suatu keberhasilan bagi pihak bank jika dapat membiayai operasionalnya menggunakan sumber dana pihak ketiga ini. Adapun sumber dana yang dihasilkan dari masyarakat luas, yaitu berupa:

- a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*), Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa giro merupakan salah satu produk simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (dilakukan berulang-ulang selama persediaan dana masih mencukupi) menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran atau dengan pemindahbukuan.
- b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), tabungan dapat diartikan dengan simpanan uang di bank yang penarikannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah

dibuat antara bank dengan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*), deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Deposito berbeda dengan jenis simpanan lainnya, dimana simpanan deposito memiliki jangka waktu lebih panjang dan tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu (jatuh tempo) berakhir berdasarkan dengan kesepakatan yang dibuat oleh deposan dan bank.

## **2.4 Bank Perkreditan Rakyat**

### **2.4.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat**

Menurut Sakdiyah (2018) mengemukakan pendapatnya bahwa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang menyediakan simpanan tabungan dalam bentuk deposito yang kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. BPR menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Menurut Fibriyanti, et al., (2018) merupakan lembaga keuangan yang aktivitasnya memberikan jasa pinjaman kepada masyarakat atau memberikan modal usaha dengan sistem konvensional serta menerapkan prinsip syariah.

Berdasarkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan sebuah lembaga keuangan perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan menerapkan prinsip syariah, dalam kegiatannya BPR memiliki keterbatasan yaitu, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti transfer, inkaso, garansi bank, aktivitas jual beli surat berharga, kartu kredit dan aktivitas lainnya yang tersedia pada bank umum.

## **2.5 Mekanisme**

### **2.5.1 Pengertian Mekanisme**

Menurut Sakdiyah (2018) berpendapat bahwa, mekanisme atau prosedur adalah tindakan yang melibatkan beberapa orang atau lebih dalam satu bagian untuk memberikan jaminan alur kerja yang lancar.

Menurut Mulyadi (2016) prosedur atau mekanisme adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa individu dalam satu divisi yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam mengenai transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Menurut Moenir (2001) berpendapat bahwa, mekanisme ialah suatu rangkaian alat kerja yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan.



Menurut Ida Nuraida (2018) prosedur atau mekanisme merupakan tata cara dalam melaksanakan pekerjaan dari suatu tugas atau lebih yang kemudian disusun membentuk aturan kegiatan.

Berdasarkan dari pengertian mekanisme diatas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa prosedur atau mekanisme merupakan serangkaian pedoman yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya.

## **2.6 Kredit**

### **2.6.1 Pengertian Kredit**

Kredit adalah fasilitas pinjaman yang disediakan pihak perbankan yang memungkinkan pihak peminjam membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah persediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan debitur yang mewajibkan pihak peminjam melunasi tagihannya dengan jangka waktu (jatuh tempo) yang telah disepakati dengan pemberian bunga.

Menurut Thamrin dan Shinta (2018), menyatakan bahwa kredit adalah sejumlah kemampuan seseorang dalam memperoleh barang dan jasa dengan memberikan jaminan dalam perjanjian dan kesepakatannya.

Berdasarkan pengertian kredit dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, kredit adalah aktivitas pinjam dan meminjam yang disediakan pihak bank bagi pihak lain yang membutuhkan dana dengan memberikan jaminan yang *marketable* sebagai jaminan bila pihak peminjam melakukan wanprestasi.

### **2.6.2 Unsur-Unsur Kredit**

Lembaga keuangan seperti perbankan menyediakan fasilitas kredit didasarkan dengan unsur kepercayaan. Dalam pemberian kredit perlu dilihat dari berbagai aspek, termasuk unsur-unsur kredit. Adapun unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2018) yang ada dalam pemberian fasilitas kredit adalah:

1. Kepercayaan, merupakan sebuah landasan yang diberikan pemberi kredit kepada debitur bahwa fasilitas yang telah diberikan (barang, jasa, ataupun uang) benar-benar akan dikembalikan dimasa mendatang sesuai dengan perjanjian jangka waktu kredit yang ditentukan. Kepercayaan dijadikan sebagai landasan utama mengapa suatu kredit itu disalurkan, dengan melakukan pendekatan tentang kondisi pemohon kredit dimasa sekarang dan dimasa lalu.
2. Kesepakatan, merupakan sebuah perjanjian antara pemohon kredit dengan pemberi kredit, dimana kesepakatan ini dibuat untuk menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing pihak yang terlibat.

3. Jangka Waktu, adalah masa waktu pengembalian kredit yang telah ditetapkan diawal perjanjian kredit.
4. Risiko, adanya suatu tenggat waktu masa pengembalian kredit dapat menyebabkan suatu masalah tidak tertagihnya kredit atau kredit macet. Semakin besar nominal kredit yang diajukan semakin besar pula risiko yang didapatkan. Risiko yang terjadi bisa dikarenakan disengaja (wanprestasi) atau risiko yang tidak disengaja misalnya, usaha debitur berhenti atau tidak berkembang.
5. Balas Jasa, merupakan sebuah laba yang didapat atas suatu pemberian kredit yang dikenal dengan (bunga, biaya administrasi, dan provisi kredit).

### **2.6.3 Tujuan Kredit**

Kredit dalam penyalurannya memiliki tujuan yang harus dicapai bergantung dengan tujuan dari bank itu sendiri. Menurut Kasmir (2018) tujuan utama penyaluran kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan  
Tujuan utama dalam penyaluran kredit, perbankan mengharapkan keuntungan. Keuntungan ini didapat bank dalam bentuk bunga, administrasi, dan provisi sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada pemohon kredit.
2. Membantu Usaha Nasabah  
Tujuan adanya penyaluran kredit juga diharapkan dapat membantu masyarakat bagi yang membutuhkan dana usaha atau modal kerja, maupun dana investasi. Tersalurkannya dana tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah  
Manfaat kredit untuk pemerintah yaitu, semakin banyak kredit yang tersalurkan oleh bank, maka semakin meningkat pula jumlah kegiatan ekonomi yang terjadi dan akan berpengaruh dengan meningkatnya pembangunan dari berbagai sektor.

Menurut Suyatno (1998) penyaluran kredit memiliki tujuan, adapun beberapa tujuan pemberian kredit, yaitu:

1. Berkontribusi menyukseskan program pemerintah dalam sektor ekonomi dan pembangunan.
2. Dapat meningkatkan aktivitas perusahaan agar menjalankan fungsinya untuk menjamin agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat
3. Memperoleh deviden agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin dan mampu memperluas kegiatan usahanya.

Berdasarkan penjelasan tujuan pemberian kredit diatas dapat penulis simpulkan bahwa, tujuan dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh laba, laba dapat diperoleh dalam berbagai bentuk, seperti dari bunga, biaya administrasi, dan juga biaya provisi yang dibebankan kepada pemohon kredit oleh pihak perbankan. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya bagi pihak bank, pihak pemohon kredit juga mendapatkan

keuntungan yaitu, keuntungan dapat mengembangkan usaha, mempertahankan usaha yang sedang dalam masa pemulihan, dan dapat memperluas usaha.

#### **2.6.4 Jenis-Jenis Kredit**

Kredit terdiri dari berbagai jenis bentuknya, tak hanya jenis kredit modal kerja dan investasi saja yang disediakan perbankan untuk masyarakat. Menurut Kasmir (2018), ada beberapa jenis kredit, yaitu jenis kredit yang dapat dilihat dari segi kegunaannya, dari segi tujuan kreditnya, segi jangka waktu, jaminan, dan juga dari segi sektor usahanya. Adapun penjelasan jenis-jenis kredit tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Dari segi kegunaan
  1. Kredit Investasi, kredit yang digunakan untuk keperluan pengembangan usaha atau membangun suatu proyek.
  2. Kredit Modal Kerja, kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi operasi dalam usaha maupun bisnis.
- b) Dari segi tujuan kredit
  1. Kredit Produktif, kredit yang dimanfaatkan untuk perluasan usaha, peningkatan operasi, dan investasi.
  2. Kredit Konsumtif, kredit yang dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan pribadi, dalam kredit konsumtif tidak ada barang dan jasa yang dapat dihasilkan.
  3. Kredit Perdagangan, kredit yang dimanfaatkan untuk membeli barang dagangan untuk usaha dan pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- c) Dari segi jangka waktu
  1. Kredit jangka pendek, kredit yang memiliki masa waktu pinjaman hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau hanya 1 tahun, biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja.
  2. Kredit jangka menengah, kredit yang memiliki masa waktu pinjaman dengan tenggat waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya kredit ini digunakan untuk kebutuhan investasi.
  3. Kredit jangka panjang, kredit ini memiliki tenggat waktu pembayaran yang paling lama yaitu berkisar 3 tahun sampai dengan 5 tahun, kredit ini biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan investasi jangka panjang.
- d) Dari segi jaminan
  1. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang dikeluarkan sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan pemohon kredit. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud seperti surat tanah, surat kepemilikan motor dan lainnya.
  2. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan hanya dengan melihat prospek usaha si pemohon kredit dan dengan melalui pendekatan karakternya saja atau biasa dikenal dengan prinsip kredit 7P (*Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*).

e) Dari segi sektor usaha

1. Kredit Pertanian, merupakan kredit untuk membiayai perkembangan sektor perkebunan atau pertanian rakyat dalam jangka waktunya dapat berupa jangka panjang maupun pendek.
2. Kredit Peternakan, kredit yang dimanfaatkan para petani ternak untuk membiayai usahanya. Kredit ini bisa masuk kedalam jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan usaha yang ditekuni.
3. Kredit Industri, kredit yang dimanfaatkan untuk perkembangan sebuah industry menengah maupun kecil.
4. Kredit Pertambangan, kredit ini biasanya termasuk dalam kredit jangka panjang, karena kredit ini dimanfaatkan untuk membiayai usaha pertambangan seperti emas, minyak, maupun timah.
5. Kredit Pendidikan, kredit yang biasanya diajukan untuk membiayai saran dan prasarana pendidikan.
6. Kredit Profesi, kredit yang biasanya diberikan untuk para dosen, guru, dokter, dan pengacara.
7. Kredit Perumahan, merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah, seperti rumah kpr atau subsidi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis dari kredit itu dapat dilihat dari berbagai macam jenis yaitu meliputi, jenis kredit dilihat dari segi kegunaan atau fungsinya, dilihat dari segi tujuan kreditnya, dilihat dari segi jangka waktunya, jaminannya, dan juga sektor usahanya.

### **2.6.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir (2018) berpendapat bahwa, sebelum pemberian kredit diberikan, bank perlu merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan. Keyakinan itu diperoleh berdasarkan hasil penilaian-penilaian kredit sebelum kredit tersalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk penilaian analisis dengan 5C kredit, yaitu sebagai berikut:

1. *Character*, meyakini bahwa sifat dan watak nasabah yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, dengan melihat latar belakang pekerjaan dan cara hidupnya.
2. *Capacity*, melihat kemampuan dari nasabah yang akan diberikan kredit dalam menjalankan usahanya selama ini dan melihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*, mengukur kemampuan nasabah yang akan diberikan kredit dengan melihat penggunaan modal apakah sudah efektif atau belum yang dapat dilihat dari laporan keuangannya dan juga perlu dilihat dari mana saja sumber modal yang didapatkan.
4. *Collateral*, adalah sebuah jaminan yang diberikan pemohon kredit yang bersifat fisik ataupun non fisik. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi dari nilai kredit yang diberikan dan juga perlu ditinjau agar jika terjadi masalah, jaminan tersebut dapat dipergunakan secepatnya.
5. *Condition*, dalam pengukuran yang dilakukan pihak bank untuk pemberian kredit, pihak bank hendaknya menilai kondisi ekonomi saat ini dan melihat prospek usaha pemohon kredit dimasa mendatang agar kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

Dalam penilaian kredit yang lainnya, pihak bank menganalisis dengan metode 7P. Adapun penilaian kredit tersebut, sebagai berikut:

1. *Personality*, penilaian pihak bank terhadap pemohon kredit dilihat dari segi kepribadian atau tingkah lakunya saat ini dan di masa lalunya.
2. *Party*, menggolongkan pihak pemohon kredit berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya.
3. *Perpose*, mencari tahu tujuan pemohon kredit mengajukan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan.
4. *Prospect*, kemampuan pihak bank dalam menilai usaha nasabah di masa mendatang apakah menguntungkan atau sebaliknya.
5. *Payment*, mengukur bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diberikan atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kreditnya.
6. *Profitability*, menganalisis kemampuan nasabah dalam memperoleh keuntungan yang diukur dari periode ke periode.
7. *Protection*, kemampuan menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan, proteksi dapat berupa jaminan barang, orang, maupun asuransi.

## 2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.7.1 Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Evita Novilia, Gleydis Harwida, Sandi Eka Suprajang (2021), Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Gapoktan Sumber Tani Kediri	Analisis	Prosedur, sistem, realisasi kredit, persyaratan	Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan data primer dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	Sistem dan prosedur pemberian kredit di koperasi gapoktan sumber tani telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh koperasi, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Penelitian ini memberikan masukan untuk melakukan pemisahan fungsi jabatan seperti kasir, dan bagian pencatatan, agar masing- masing pekerjaan memiliki kewenangan dan tanggung jawab.
2	Rioni, Saraswati, Yunus (2019) Analisis Pengajuan Kredit dan Pengendalian Intern Pada PT. Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe	Analisis	Prinsip kredit, pengendalian intern, kebijakan, prosedur kredit, analisa	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada PT Bank BNI Cabang Kabanjahe	Pemberian kredit dan pengendalian internal yang diterapkan PT. Bank BNI Cabang Kabanjahe telah efektif, karena telah mencapai tujuan dari pengendalian internal pemberian kredit yaitu, keandalan pelaporan keuangan pemberian kredit, efektivitas dan efisiensi

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					pemberian kredit, ketaatan terhadap hukum dan peraturan kredit
3	Desi Catur Wulandari, Dwi Iga Luhsasi (2019), Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam ASA Mandiri Ampel	Analisis	Prosedur kredit, tahapan, persyaratan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis mode interaktif Miles dan Huberman melalui wawancara semi terstruktur yang melibatkan tiga informan	Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam ASA Mandiri Ampel sudah berjalan secara efektif, namun dalam pelaksanaan prosedurnya tidak melakukan tahapan wawancara dan survei.
4	Benget Tua Simarmata, SE., M.M, Edo Samuel Panjaitan (2021), Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Duta Paramarta Kantor Cabang Pancur Batu	Analisis	Analisis, prosedur, prinsip, kredit	Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif	Prosedur pemberian kredit di PT. BPR Duta Paramarta Pancur Batu sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit pada peraturan otoritas jasa keuangan nomor 33/PJOK.03/2018.
5	Widayanti, Eko Riadi, Rinto Alexandro, Dehen Erang, Windy Utami Putri (2022), Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada BRI Palangka Raya Unit Yos Sudarso	Analisis	Tahapan kredit, KUR, prosedur	Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan instrumen penelitian deskriptif.	Dalam penelitian ini prosedur pemberian kredit usaha rakyat di Bank BRI Palangka Raya Unit Yos Sudarso sudah cukup baik, dalam pelaksanaannya pihak Bank sudah cukup teliti untuk menseleksi calon-calon nasabahnya.

Adanya acuan lima penelitian terdahulu diatas mengenai analisis pengajuan pinjaman kredit telah banyak dilakukan di indonesia, tetapi walaupun banyak peneliti mengangkat tema ini, fenomena yang peneliti teliti belum pernah ada di penelitian sebelumnya. Maka dari itu peneliti memilih untuk melakukan penelitian analisis mekanisme pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor.

### **2.7.2 Kerangka Pemikiran**

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai mekanisme pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor terhadap besarnya tingkat persentase rasio NPL atau kredit bermasalah. Menurut Kasmir (2018) Bank merupakan unsur yang paling penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Hal tersebut berhubungan dengan peran bank itu sendiri yaitu sebagai media intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank dalam mendapatkan laba dalam operasionalnya. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Apabila kredit mengalami masalah dalam prosesnya, hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank di masa mendatang. Kredit yang diberikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Ada beberapa kategori penggolongan kredit berdasarkan kolektabilitasnya. Menurut SK DIR. BI No.30/267/kep/DIR/1998 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan menyebutkan bahwa kredit dibagi menjadi beberapa bagian yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Pendapatan utama bank yaitu berasal dari penyaluran kredit, dimana apabila manajemen bank menginginkan pendapatan yang besar, kredit yang diberikan kepada masyarakat harus besar pula. Disisi lain pemberian kredit yang lebih besar menimbulkan risiko timbulnya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang diakibatkan pihak debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

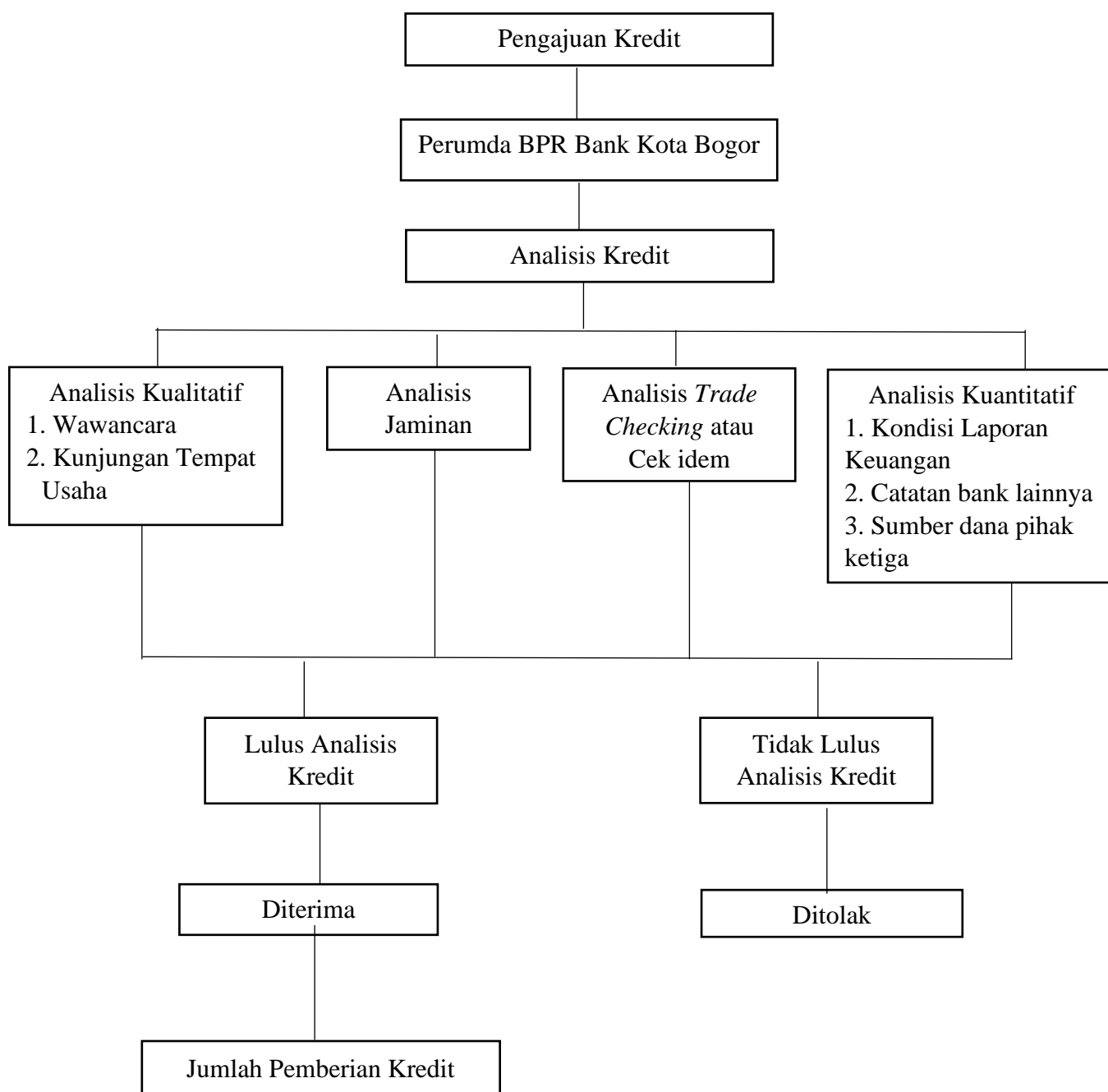
*Non Performing Loan* Menurut Rivai (2013) merupakan kredit bermasalah yang terjadi akibat dari wanprestasi dalam pengembalian dana sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi pihak bank. Sehingga apabila tingkat NPL semakin tinggi maka akan menimbulkan kerugian pada bank.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mira Daelawati (2013) menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan pada sepuluh bank terbesar yang terdaftar di Bursa Efek



Indonesia. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Wayan dan Made Rusmala (2014) menyatakan bahwa *Non Performing Loan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh LPD kabupaten Badung. Peneli

Berdasarkan uraian diatas, penelitian bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota bogor. Berdasarkan pemahaman diatas, dapat digambarkan konstelasi penelitian yang menampilkan variabel dalam penelitian ini yaitu analisis mekanisme pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor untuk melihat lebih jelas kerangka pemikirannya, maka konstelasi penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif ini adalah data yang terkumpul dalam bentuk fakta-fakta yang tampak sehingga tidak terpacu pada statistik. Teknik penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018) adalah metode yang berlandaskan pada filsafat enterpretif digunakan untuk meneliti keadaan objek yang alamiah. Metode kualitatif ini dipilih sebab dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penulis dapat menyelidiki secara mendalam tentang sebuah fenomena dan data yang diperoleh dari beberapa informan.

#### **3.2 Objek, Unit, Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Unit analisis penelitian ini penulis menggunakan unit analisis mengenai individu atau suatu lembaga yaitu sumber data yang diperoleh dari setiap individu. Individu disini adalah *Account Officer*, *customer service*, admin kredit, analisis kredit, dan manajer pelaporan di Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu di Perumda BPR Bank Kota Bogor yang berlokasi di Jl. Re. Martadinata No.45, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang berupa informasi berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

##### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini diperoleh penulis berupa data primer yang berasal dari data unit analisis yang diamati yaitu individu atau orang dalam lembaga atau instansi dengan melakukan observasi di Perumda BPR Bank Kota Bogor. Wawancara kepada informan yang sesuai dengan target sasaran dari penelitian yaitu *Account Officer*, *customer service*, admin kredit, analisis kredit, dan manajer pelaporan di Perumda BPR Bank Kota Bogor. Dokumentasi berbentuk pencatatan hasil

observasi, wawancara, dan gambar-gambar yang ada pada lokasi penelitian yang dimiliki penulis.

### 3.4 Metode Penarikan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2018) adalah wilayah penyamarataan yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sampel menurut Sugiyono (2018) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan sampel jenuh dan sampel kebetulan (*Convenience Sampling*) dimana seluruh populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan jika jumlah populasi kurang dari 30 informan, sedangkan sampel kebetulan dilakukan jika tiap-tiap populasi dengan setuju memberikan informasi. Informan yang ada sudah mewakili dalam menganalisis pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor. Berikut merupakan tabel informan dalam menganalisis pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian Pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor**

No	Sasaran	Jumlah	Status
1	Account Officer	2	Informan Utama
2	Customer Service	1	Informan Utama
3	Admin Kredit	1	Informan Utama
4	Analisis Kredit	2	Informan Utama
5	Manajer Kredit	1	Informan Utama
	Jumlah	7	Informan Utama

**Tabel 3.2 Informan Penelitian Nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor**

No	Sasaran	Jumlah	Status
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2	Informan Utama
2	Pegawai Swasta	2	Informan Utama
	Jumlah	4	Informan Utama

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa informan pegawai dari Perumda BPR Bank Kota Bogor dalam penelitian ini yaitu 2 informan account officer, 1 informan customer service, 1 informan admin kredit, 2 informan analisis kredit, dan 1 manajer kredit. Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa informan berasal dari nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor yaitu 2 informan dari Pegawai Negeri Sipil dan 2 informan berasal dari Pegawai Swasta. Dapat disimpulkan bahwa jumlah informan secara keseluruhan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 11 informan.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2018) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan, wawancara, angket, dokumentasi dan gabungan dari keempatnya (triangulasi).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui metode pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

#### **3.5.1 Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1) Observasi**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi partisipatif dan partisipasi lengkap. Observasi partisipasi lengkap menurut Sugiyono (2018) yaitu dalam melakukan pengumpulan data peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas yang diteliti.

Observasi yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang terjadi dalam pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor.

##### **2) Wawancara**

Menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui informasi dari responden yang lebih mendalam dari jumlah responden yang sedikit. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Terkait dengan pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor, kegiatan wawancara ini dilakukan terhadap narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang sesuai tentang pengajuan pinjaman pinjaman kredit. Adapun pihak-pihak yang akan menjadi target wawancara ini yaitu account officer, customer service, admin kredit, analisis kredit, dan manajer pelaporan. Wawancara dilakukan dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang dibuat.

##### **3) Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dengan dokumentasi

digunakan dalam bentuk dokumen, arsip-arsip, laporan, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Dokumen-dokumen tersebut berbentuk laporan data harian dan bulanan yang dimiliki penulis selama berjalannya masa magang, catatan hasil observasi, catatan hasil wawancara, dan gambar-gambar yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian.

#### 4) Triangulasi

Menurut Sugiyono (2018) dalam metode pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai metode pengumpulan data dan sumber data yang bersifat menggabungkan dari berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi agar peneliti dapat mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai sumber data.

### 3.6 Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2018) penelitian kualitatif dalam temuan atau datanya dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Realitas pada penelitian kualitatif bersifat ganda, dinamis, atau selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Dengan demikian tidak ada suatu data yang tetap atau konsisten. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji *transferability*, uji *dependability*, uji *confirmability*.

#### 3.6.1 Uji Kredibilitas

Dalam penelitian ini, kredibilitas data diuji menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2018) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai metode pengumpulan data. Triangulasi dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik dalam penelitian ini dicapai dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 3.6.2 Uji *Transferability*

Menurut Sugiyono (2018) uji *transferability* adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke dalam populasi dimana sampel penelitian diambil.

Penelitian ini uji *transferability* yang dilakukan yaitu penulis memberikan uraian yang jelas, rinci, dan sistematis terhadap hasil penelitian. Hasil penelitian diuraikan secara jelas, rinci, dan sistematis bertujuan agar penelitian ini mudah dipahami dan hasil dari penelitian ini dapat diterapkan ke dalam populasi dimana penelitian ini diteliti yaitu di Perumda BPR Bank Kota Bogor pada masa yang akan datang.

### 3.6.3 Uji *Dependability*

Uji *dependability* menurut sugiyono (2018) merupakan uji reabilitas dalam penelitian kualitatif. Suatu penelitian yang *reliable* adalah penelitian yang apabila orang lain dapat mengulangi atau mengimplikasi proses dari penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

Penelitian ini uji *dependability* yang penulis lakukan yaitu audit dengan cara penulis berkonsultasi dengan komisi pembimbing, kemudian komisi pembimbing akan mengaudit secara keseluruhan proses penelitian. Penulis berkonsultasi dengan komisi pembimbing untuk meminimalisir kekeliruan dalam proses dilakukannya penelitian dan penyajian hasil penelitian yaitu hasil analisis pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor.

### 3.6.4 Uji *Confirmability*

Menurut Sugiyono (2018) uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian disepakati oleh orang banyak. Uji *confirmability* yaitu menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian telah memenuhi standar penelitian uji *confirmability*.

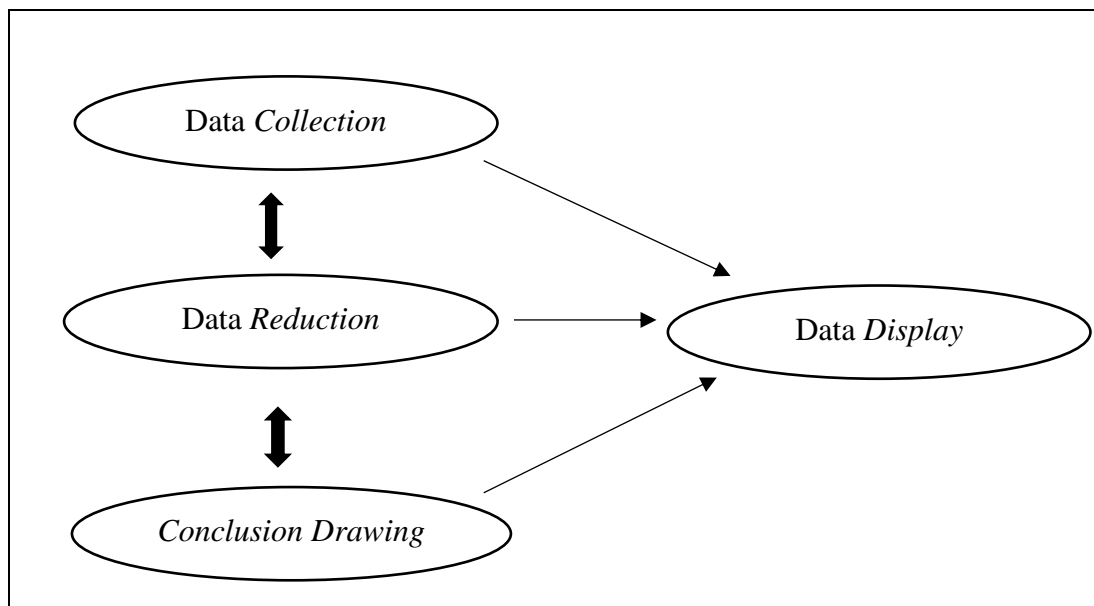
Uji *confirmability* yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis kembali data yang didapat tentang mekanisme pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor.

## 3.7 Metode Pengolahan Analisis Data

### 3.7.1 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori atau pengelompokkan, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara analisis deskriptif *non statistics*. Analisis data bersifat kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan data *collection*, data *reduction*, data *conclusions drawing*, data *displays*. Tahapan analisis data ini melalui metode analisis komponen data seperti pada gambar dibawah ini.



**Gambar 3.1 Komponen Analisis Data**

Sumber: Sugiyono (2018: 296)

Dilihat pada gambar 3.1 diatas menurut Sugiyono (2018) dapat dijelaskan bahwa proses dari pengumpulan data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. *Data Collection* atau pengumpulan data adalah sebuah proses pengumpulan data yang perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Dalam tahap ini data yang dikumpulkan dan dicatat secara teliti dan rinci yaitu data observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mekanisme pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor.
2. *Data Reduction* atau reduksi data yaitu meringkas, memilih mana hal yang pokok atau penting, menyusunnya kedalam suatu urutan yang logis, serta mengkaitkannya dengan aspek-aspek yang terkait agar dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil observasi. Dalam tahap ini, reduksi datanya meliputi data observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mekanisme pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor dirangkum dan disusun. Dengan demikian data observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mekanisme pengajuan pinjaman kredit yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya jika dibutuhkan.
3. *Conclusion Drawing* atau penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan pengecekan kebenaran data yang telah ditafsirkan. Seluruh data observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mekanisme pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor yang ada dan telah dilakukan analisis dicocokkan kembali apakah sudah sesuai, apakah masih perlu dikonfirmasi ulang, atau perlu perbaikan, atau diperlukan data pendukung lainnya untuk memperkuat.

4. *Data Display* atau Penyajian data adalah data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disimpulkan yang akan sangat membantu peneliti maupun individu lain. *Display* merupakan media yang menjelaskan objek yang diteliti dimana data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk narasi dengan bahasa ragam ilmiah dengan berupa bagan, tabel, gambar, dan foto. Dalam tahap ini hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mekanisme pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor disajikan dan hasilnya berupa kesimpulan mengenai hasil analisis serta persetujuan terhadap pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor.



## BAB IV

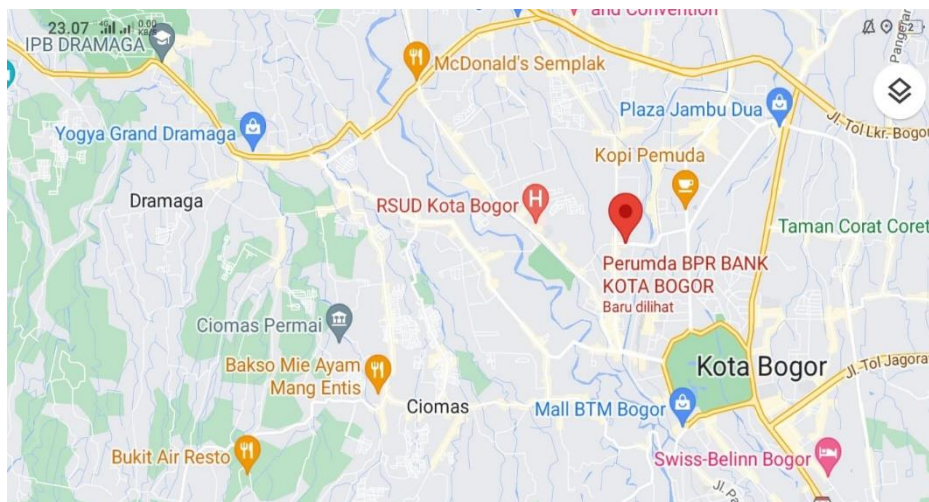
### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Perumda BPR Bank Kota Bogor

Perumda BPR Bank Kota Bogor merupakan wujud perubahan dari Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Bogor. Bank Pasar diawali pada tanggal 3 Juli 1975 melalui izin usaha dari Departemen Keuangan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan pemerintah Kota Bogor. Perusahaan mulai beroperasi dengan menggunakan nama Perusahaan Umum Daerah pada tanggal 27 November 2017 yang diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Bogor. Saat ini Perumda BPR Bank Kota Bogor mempunyai 1 (satu) Kantor Pusat yang berlokasi di Jl. R.E. Martadinata No. 45, Bogor Tengah, Kota Bogor dibantu oleh 3 (tiga) Kantor Kas yang berlokasi di Jl. Suryakencana No. 3 lantai 4 Pasar Baru Bogor, Jl. Sawojajar No. 8 Bogor dan Komplek Perkantoran Balaikota Bogor Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Bogor, dan dalam kegiatan operasionalnya dibantu oleh 1 (satu) unit mobil kas keliling. Data yang diperoleh mengenai gambaran umum Perumda BPR bank Kota Bogor adalah sebagai berikut:

##### 4.1.1 Lokasi Perumda BPR Bank Kota Bogor

Perumda BPR Bank Kota Bogor merupakan bank milik pemerintah daerah yang berlokasi di Jl. R.E Martadinata No. 45, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124. Berikut merupakan gambar peta lokasi Perumda BPR Bank Kota Bogor



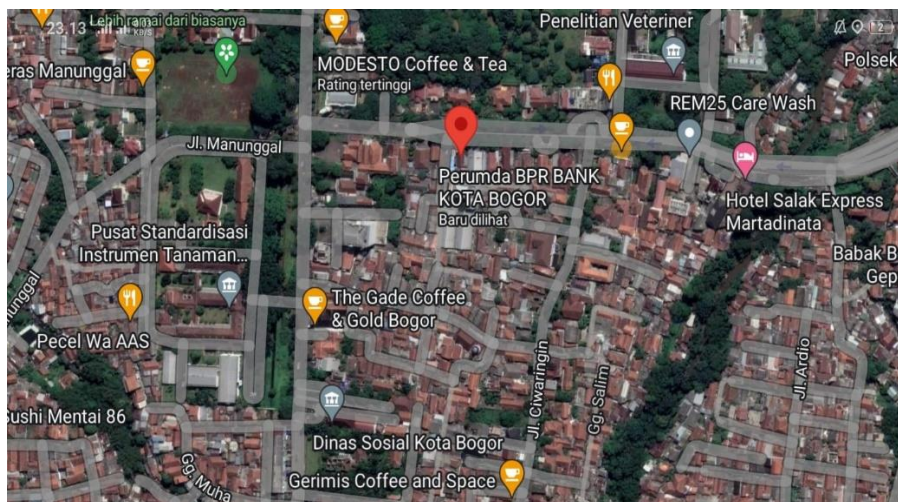
*Sumber: Google Maps, 2022*

**Gambar 4.1 Peta Lokasi Perumda BPR Bank Kota Bogor**

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa Perumda BPR Bank Kota Bogor berlokasi strategis dekt dengan pusat kota dan terjangkau dengan menggunakan

kendaraan umum. Kendaraan umum yang dapat digunakan untuk mengakses Perumda BPR Bank Kota Bogor yaitu kendaraan umum seperti, angkutan umum (angkot) maupun transportasi *online*. Kendaraan umum yang dapat menjangkau Perumda BPR Bank Kota Bogor yaitu, angkutan umum dengan kode trayek 07A tujuan air mancur dan dilanjutkan dengan angkutan umum kode trayek 12 yang akan sampai langsung di depan Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Sedangkan secara letak geografis Perumda BPR Bank Kota Bogor adalah sebagai berikut:



Sumber: Google Maps, 2022

#### **Gambar 4.2 Peta Satelit Perumda BPR Bank Kota Bogor**

Berdasarkan gambar 4.2 yang berisi gambar peta satelit Perumda BPR Bank Kota Bogor dapat dilihat bahwa Perumda BPR Bank Kota Bogor berlokasi strategis dan berada disisi pusat kota karena banyak sekali hotel, kedai kopi dan juga kantor dinas pemerintahan yang dapat dijumpai disekitar.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Perumda BPR Bank Kota Bogor**

Visi dan Misi Perumda BPR Bank Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Visi : Menjadi BPR terpercaya dengan citra prima dalam layanan keuangan.

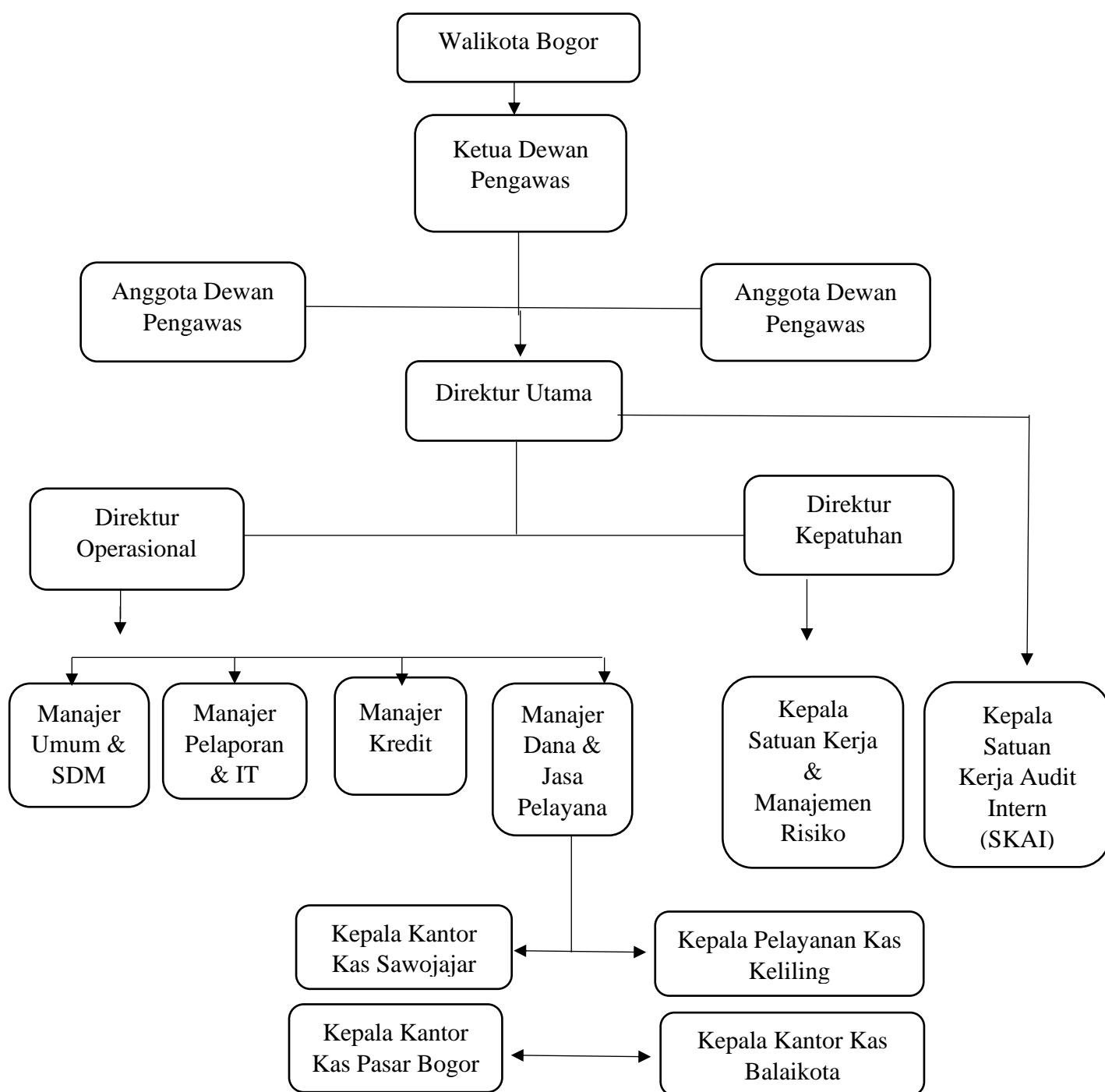
Misi :

1. Berperan dalam rangka mendorong pengembangan perekonomian Kota Bogor.
2. Berperan secara maksimal sebagai sumber pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan dan peningkatan nilai perusahaan yang berkesinambungan.
3. Memberikan pelayanan terbaik dan profesional.
4. Melaksanakan pengembangan kinerja dan usaha secara berkesinambungan.
5. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM secara berkesinambungan menuju profesionalitas, integritas dan berbudaya.

### 4.1.3 Struktur Organisasi Perumda BPR Bank Kota Bogor

Dalam suatu perusahaan maupun organisasi, pembagian tugas dan wewenang sangat dibutuhkan demi tercapainya suasana kerja yang baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya Struktur organisasi. Berikut adalah struktur organisasi di Perumda BPR Bank Kota Bogor.

#### a. Struktur Organisasi Perumda BPR Bank Kota Bogor



Sumber: Data Sekunder Perumda BPR Bank Kota Bogor

**Gambar 4.3 Struktur Organisasi Perumda BPR Bank Kota Bogor**

## b. Uraian Tugas

Uraian tugas masing-masing individu dilihat berdasarkan Struktur Organisasi di Perumda BPR Bank Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Walikota Bogor  
Walikota Bogor sebagai pemilik dan pendiri Perusahaan Daerah Perumda BPR Bank Kota Bogor.
2. Ketua Dewan Pengawas  
Dewan pengawas memiliki tugas yaitu mengawasi dan memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor dan melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi Perumda BPR Bank Kota Bogor.
3. Direktur Utama  
Direktur utama merupakan organ dalam perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan di Perumda BPR Bank Kota Bogor untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Bank Kota Bogor dan dapat mewakili Perumda BPR Bank Kota Bogor di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan daerah atau anggaran dasar.
4. Direktur Operasional  
Direktur operasional memiliki tugas dalam membantu direktur utama dalam menjalankan tugas serta menyusun laporan kegiatan, direktur operasional juga memiliki tanggung jawab dalam seluruh proses operasional, pengembangan karyawan dan kualitas produk, membantu menyusun strategi agar target perusahaan bisa tercapai, melakukan pengecekan dan pengawasan kebutuhan terkait operasional perusahaan, menyusun rencana, mengambil keputusan, dan berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, dan melakukan pengawasan serta memastikan setiap karyawan menjalankan tugas sesuai dengan *jobdesk* nya.
5. Direktur Kepatuhan  
Direktur kepatuhan memiliki tugas untuk menyusun dan merumuskan strategi budaya kepatuhan pada tiap individu, mengusulkan kebijakan kepatuhan ataupun prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Manajer Umum dan Sumber Daya Manusia  
Membuat rencana usulan dan program kerja kegiatan rumah tangga dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka penyusunan rencana bisnis bank, menyusun kebijakan dan sistem operasional, menyusun materi perjanjian kerjasama, melaksanakan kegiatan korespondensi, membantu masalah administrasi

dan pengarsipan, melaksanakan proses pengadaan barang, bertugas membantu proses pembiayaan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional bank, mencatat secara tepat guna dan tepat waktu dari semua kegiatan direksi, menjalin dan menjaga hubungan kemasyarakatan (*Public Relation*) dengan masyarakat atau pihak lain, bertugas menganalisis kebutuhan pegawai dan perekrutan pegawai, melakukan pemeliharaan pegawai meliputi ketenangan kerja, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja, mengatur hak cuti pegawai, dan melakukan penanganan terhadap setiap adanya pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Manajer Pelaporan dan IT

Membuat proyeksi usulan dan program kerja penghimpunan dana dan peningkatan jasa layanan bank serta pengelolaan dana, menyusun rumusan materi peraturan atau prosedur serta ketentuan internal lainnya, melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya yang terkait dengan bidang tugasnya, melakukan pengumpulan, pemeriksaan, analisis, pencatatan, identifikasi dalam penyusunan laporan dan pengarsipkan seluruh transaksi atau mutasi keuangan, melakukan analisa laporan transaksi atau mutasi keuangan, menyusun, membuat, menyajikan dan menyampaikan seluruh pembukuan dan pelaporan keuangan kepada otoritas perbankan atau pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan lainnya selain laporan keuangan kepada otoritas perbankan atau pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertugas menyelenggarakan pengelolaan sistem teknologi informasi meliputi.

8. Manajer Kredit

Menyusun proyeksi program kerja kegiatan perkreditan dalam rangka penyusunan rencana bisnis bank, menyusun rumusan materi peraturan sistem operasional prosedur serta ketentuan internal lainnya yang akan ditetapkan direksi, melakukan koordinasi dengan bagian atau unit kerja lainnya yang terkait dengan bidang tugasnya, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan proses perkreditan, dan melakukan pengawasan dalam rangka penerapan program APU-PPT.

9. Manajer Dana dan Jasa Pelayanan

Menyusun proyeksi program kerja kegiatan penghimpunan dana dan peningkatan jasa layanan bank, menyusun rumusan materi perjanjian kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain, melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya yang terkait dengan bidang tugasnya, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan penghimpunan dana dan peningkatan jasa layanan bank, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dana bank dan antar bank, melakukan supervisi kepada kantor kas dan pelayanan kas keliling, melakukan pengawasan dalam rangka penerapan program APU-PPT, dan melakukan pengawasan terhadap setiap adanya pengaduan nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Kepala Satuan Kerja dan Manajemen Risiko

Menyusun program kerja kegiatan penghimpunan dana dan peningkatan jasa layanan bank serta pengelolaan likuiditas bank dan antar bank, menyusun kebijakan dan sistem operasional serta ketentuan internal yang akan ditetapkan direksi, melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern terkait adanya pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai bank, melakukan koordinasi, rekomendasi dan sosialisasi kepada bagian unit kerja lain termasuk pegawai terkait kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, memantau, memahami dan mensosialisasikan setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, memastikan tiap unit kerja sudah melakukan penerapan prosedur kepatuhan, melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan, melakukan koordinasi dengan bagian unit kerja lainnya dalam rangka melakukan analisis yuridis terhadap warkat dan/atau dokumen bank, melakukan identifikasi dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan usaha dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, melakukan kajian dan analisa terhadap semua produk dan aktivitas baru terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memantau posisi risiko secara keseluruhan, memberikan rekomendasi kepada unit kerja yang mengelola *core business* atau kepada manajemen risiko terkait penerapan manajemen risiko, menyelenggarakan dan menganalisis penerapan program APU-PPT.

11. Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Menyelenggarakan aktivitas audit internal, seperti audit rutin terhadap seluruh kegiatan serta pelaksanaan tugas di semua bagian atau unit kerja, audit khusus terhadap indikasi kekeliruan atau kesalahan dalam seluruh kegiatan serta pelaksanaan tugas, audit investigatif terhadap indikasi adanya penyimpangan dan kecurangan (*fraud*), memberikan saran kepada seluruh bagian unit kerja sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku terkait sistem pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan internal.

12. Kepala Kantor Kas

Kepala kantor kas bertugas memimpin kantor kas dan bertindak atas nama direksi, melakukan pengembangan dan pemasaran baik dana dan jasa bank, melakukan sosialisasi dengan nasabah terkait produk bank, meningkatkan kualitas tim yang dipimpin untuk pencapaian target, dan bertanggung jawab penuh pada operasional di kantor cabang.

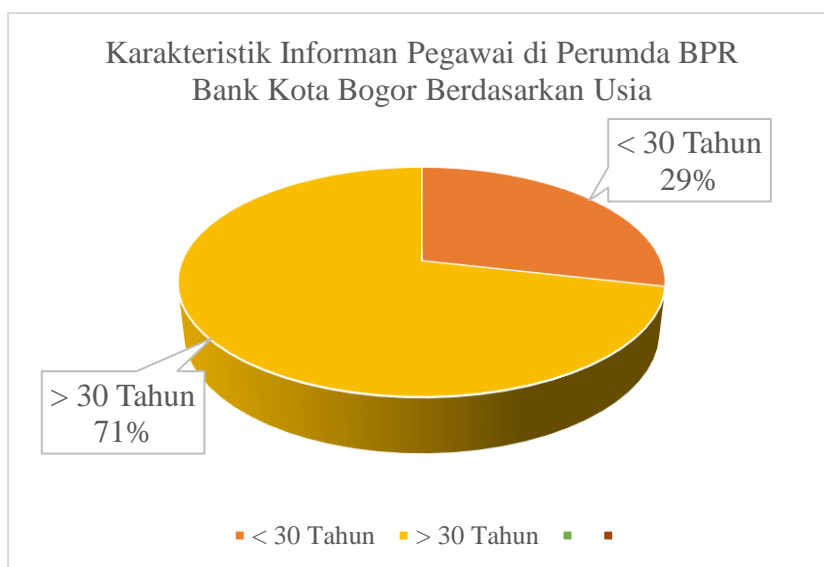
## 4.2 Profil Informan

Menurut Moleong (2016) informan penelitian merupakan orang yang membantu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta latar belakang penelitian dan merupakan orang yang mengetahui permasalahan yang ada pada objek penelitian yang akan diteliti.

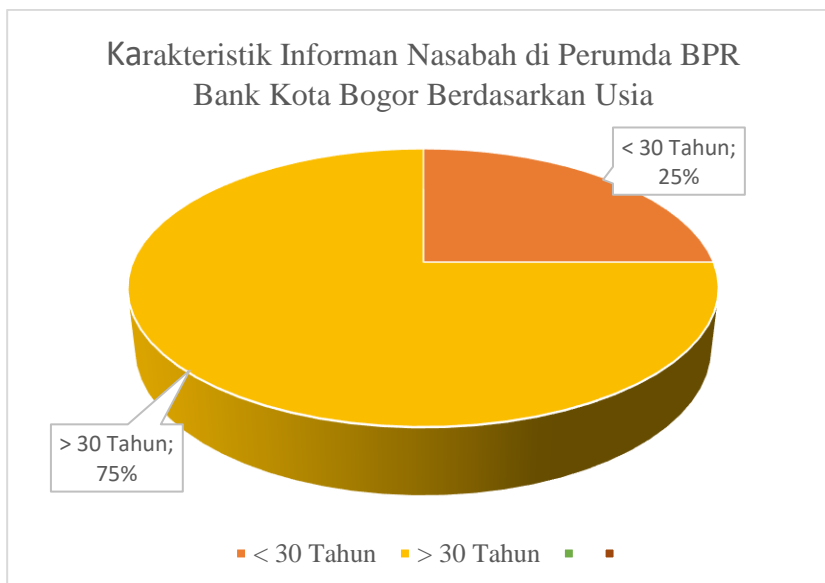
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur dengan informan.

Karakteristik informan yang diteliti mencakup domisili, usia, jenis kelamin, dan lama bekerja. Berikut ini hasil data karakteristik informan pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor sebanyak 7 orang dan informan nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor sebanyak 4 orang.

### 1. Usia Informan



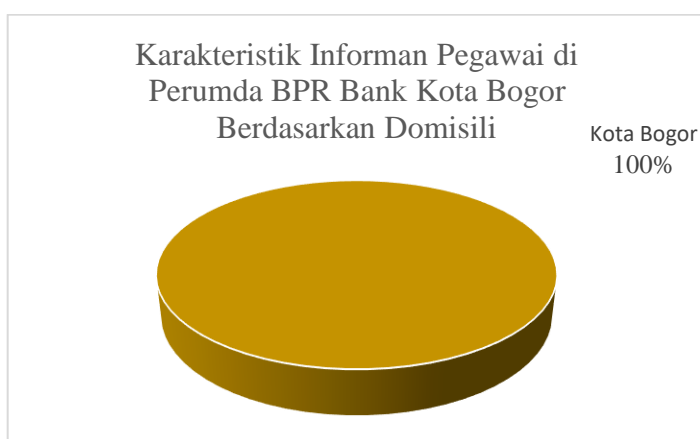
**Gambar 4.4 Diagram Karakteristik Informan Pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Usia**



**Gambar 4.5 Diagram Karakteristik Informan Nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Usia**

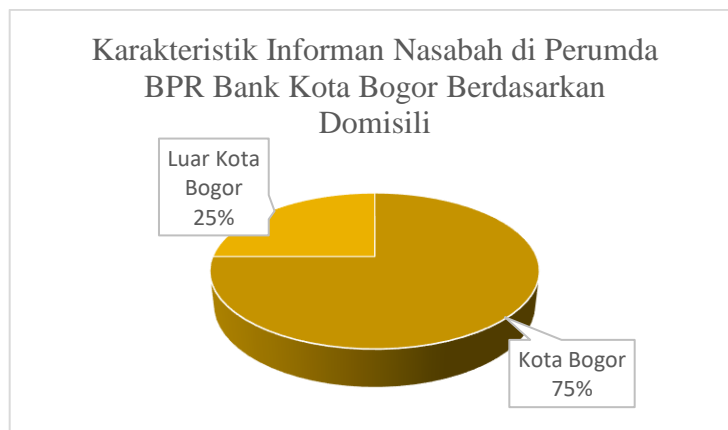
Berdasarkan data pada gambar 4.4 dapat dilihat berisi tentang karakteristik informan pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor berdasarkan usia, dilihat pada data tersebut informan dengan usia kurang dari 30 tahun sebanyak 2 orang dan informan dengan usia lebih dari 30 tahun sebanyak 5 orang.

Pada gambar 4.5 berisi tentang karakteristik informan nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor berdasarkan usia, dilihat pada data tersebut informan nasabah dengan usia kurang dari 30 tahun sebanyak 1 orang dan informan nasabah dengan usia lebih dari 30 tahun sebanyak 3 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa informan pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor dalam penelitian didominasi oleh informan dengan usia lebih dari 30 tahun.



**Gambar 4.6 Karakteristik Informan Pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Domisili**

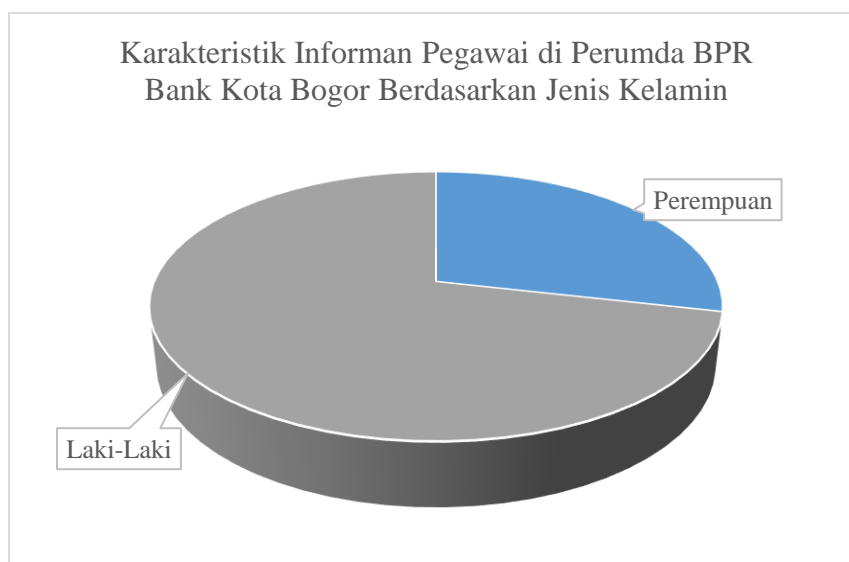




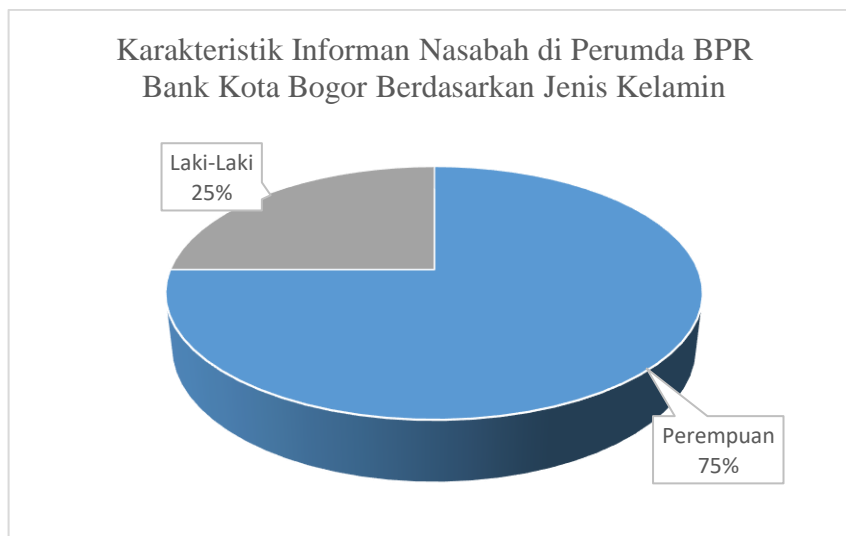
**Gambar 4.7 Karakteristik Informan Nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Domisili**

Berdasarkan pada gambar 4.6 yang berisi tentang karakteristik informan pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor berdasarkan domisili, dapat dilihat pada data tersebut bahwa informan yang berdomisili di kota bogor sebanyak 7 orang.

Gambar 4.7 berisi tentang karakteristik informan nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor berdasarkan domisili, dilihat pada data tersebut informan nasabah yang berdomisili di kota bogor sebanyak 3 orang dan informan nasabah yang berdomisili di luar kota bogor sebanyak 1 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa informan nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor dalam penelitian didominasi oleh informan dengan domisili kota bogor.



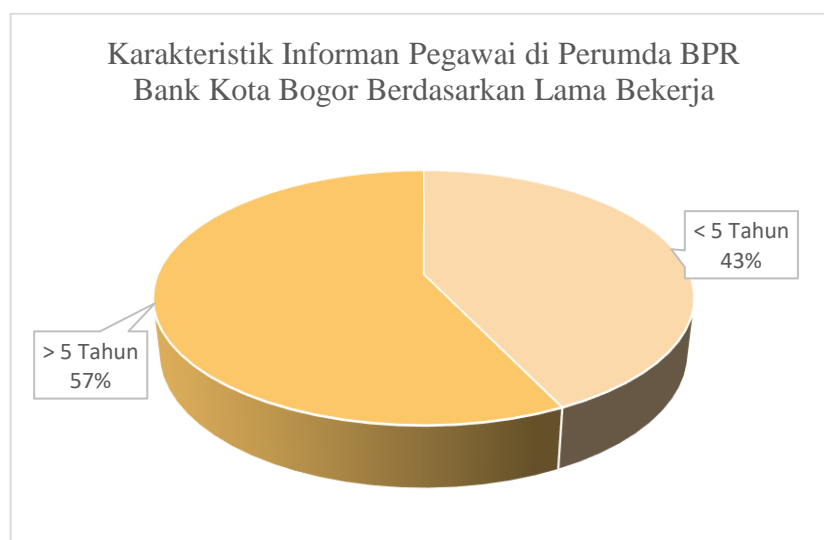
**Gambar 4.8 Karakteristik Informan Pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Jenis Kelamin**



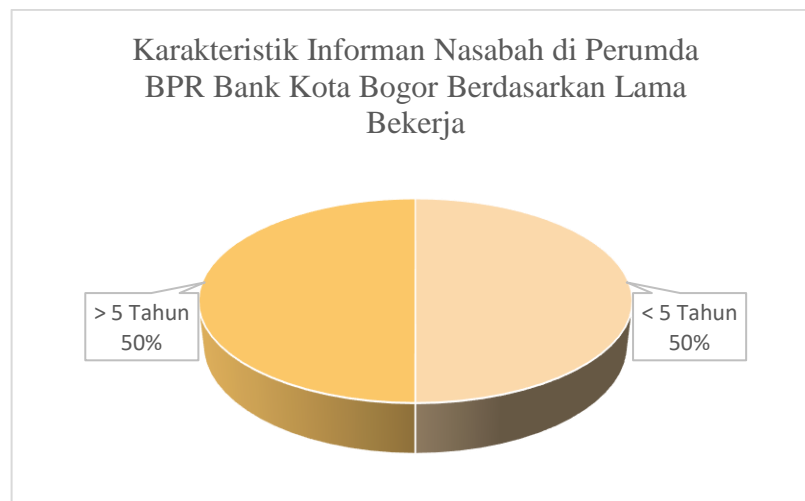
**Gambar 4.9 Diagram Karakteristik Informan Nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan data pada gambar 4.8 yang berisi tentang karakteristik informan pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa informan perempuan sebanyak 2 orang dan informan laki-laki sebanyak 5 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa informan pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor dalam penelitian ini didominasi oleh informan laki-laki.

Gambar 4.9 yang berisi tentang karakteristik informan nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa informan perempuan sebanyak 3 orang dan informan laki-laki sebanyak 1 orang. Dari data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa informan nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor didominasi oleh informan perempuan.



**Gambar 4.10 Diagram Karakteristik Informan Pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Lama Bekerja**



**Gambar 4.11 Karakteristik Informan Nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor Berdasarkan Lama Bekerja**

Berdasarkan data pada gambar 4.10 yang berisi tentang karakteristik informan pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor berdasarkan lama bekerja dapat dilihat bahwa informan dengan lama bekerja kurang dari 5 tahun sebanyak 3 orang dan informan dengan lama bekerja lebih dari 5 tahun sebanyak 4 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa informan pegawai di Perumda BPR Bank Kota Bogor dalam penelitian ini didominasi oleh informan dengan lama bekerja lebih dari 5 tahun, sedangkan pada tabel 4.8 dan gambar 4.11 yang berisi tentang karakteristik informan nasabah di Perumda BPR Bank Kota Bogor berdasarkan lama bekerja dapat dilihat bahwa informan dengan lama bekerja kurang dari 5 tahun sebanyak 2 orang dan informan dengan lama bekerja lebih dari 5 tahun sebanyak 2 orang.

### 4.3 Analisis Data Model Miles dan Huberman

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif dengan menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahapan data yaitu *data collection*, *data reduction*, *conclusion drawing*, dan *data display*.

#### 4.3.1 Data Collection

*Data Collection* merupakan sebuah tahapan data yang dikoleksi atau dikumpulkan. Pada tahapan ini data yang dikumpulkan yaitu meliputi data observasi, data wawancara, dan data dokumentasi. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur dengan 11 informan dengan membagikan kuesioner kepada masing-masing informan dan direkam atas persetujuan informan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan yaitu berupa dokumentasi hasil observasi dan wawancara. Berikut merupakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan.

**Tabel 4. 1 Data Hasil Wawancara Informan**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	<p>Responden 1: Penting</p> <p>Responden 2: Sangat Penting</p> <p>Responden 3: Sangat Penting</p> <p>Responden 4: Ya penting</p> <p>Responden 5: Ya, sangat penting</p> <p>Responden 6: Penting</p> <p>Responden 7: Ya</p> <p>Responden 8: Iya penting agar berjalan lancar</p> <p>Responden 9: Ya</p> <p>Responden 10: Sangat penting</p> <p>Responden 11: Penting</p>
2	Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	<p>Responden 1 : Iya, mengetahui</p> <p>Responden 2 : Saya mengetahui itu</p> <p>Responden 3: Tidak tau</p> <p>Responden 4: Iya saya mengetahuinya</p> <p>Responden 5: Iya, saya mengetahui</p> <p>Responden 6: Ya mengetahui</p> <p>Responden 7: Saya tidak tahu</p> <p>Responden 8: mengetahui</p> <p>Responden 9: Ya</p> <p>Responden 10: Mengetahui</p> <p>Responden 11: Iya benar</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
3	<p>Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> <p>Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	<p>Responden 1: Betul, apa yang saya ketahui dengan yang dijelaskan sesuai dengan prosedur</p> <p>Responden 2: Ya, sudah sesuai</p> <p>Responden 3: Betul, sesuai dengan apa yang dijelaskan</p> <p>Responden 4: Ya secara global persyaratan untuk pedagang, karyawan swasta, guru sertifikasi dan PNS tidak jauh berbeda. Namun untuk pinjaman karyawan swasta menggunakan jaminan SK Karyawan tetap ditambah dengan jaminan tambahan seperti (motor/mobil/shm) Untuk pinjaman PNS jaminan berupa SK (Pangkat/Berkala/Ijazah/Taspen) tanpa jaminan tambahan Untuk Pedagang jaminan berupa SHM (Tanah/Bangunan) disertai dengan persyaratan lain seperti: surat keterangan usaha, slip pembayaran rekening listrik/air/telepon, dan pembayaran PBB</p> <p>Responden 5: Benar</p> <p>Responden 6: Iya betul</p> <p>Responden 7: Benar</p> <p>Responden 8: Iya</p> <p>Responden 9: Ya, khusus sumber dana dari tunkin</p> <p>Responden 10: Benar</p> <p>Responden 11: Iya benar</p>
4	<p>Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?</p>	<p>Responden 1: Iya, mereka menjelaskan terlebih dahulu sebelum proses permohonan</p> <p>Responden 2: Iya, menjelaskan dulu</p> <p>Responden 3: Iya, mereka menjelaskan terlebih dahulu</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>Responden 4: Ya, semua nasabah yang datang untuk meminta informasi terkait dengan kredit dijelaskan</p> <p>Responden 5: Iya menjelaskan seperti yang dijabarkan diatas</p> <p>Responden 6: Menjelaskan sesuai pertanyaan sebelumnya</p> <p>Responden 7: Benar</p> <p>Responden 8: Iya benar</p> <p>Responden 9: Ya, karena sesuai dengan prosedur yang ditetapkan</p> <p>Responden 10: benar karena sebelum calon debitur pengajuan kredit syarat-syarat harus lengkap terlebih dahulu agar bisa diproses lebih lanjut</p> <p>Responden 11: Iya</p>
5	Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?	<p>Responden 1: Iya, sebagai bagian dari prosedur</p> <p>Responden 2: Iya</p> <p>Responden 3: Benar</p> <p>Responden 4: Ya, semua nasabah yang datang untuk meminta informasi terkait dengan kredit dijelaskan</p> <p>Responden 5: Betul</p> <p>Responden 6: Iya</p> <p>Responden 7: Benar</p> <p>Responden 8: Iya benar</p> <p>Responden 9: Iya, agar data dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>Responden 10: Benar, karena persyaratan yang dilengkapi untuk pengajuan kredit sebagai data bank . dan <i>survey</i> usaha untuk nasabah umkm wajib untuk dilakukan</p> <p>Responden 11: Iya benar</p>
6	<p>Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?</p>	<p>Responden 1: Iya, terdapat kunjungan dan <i>survey</i></p> <p>Responden 2: Betul, ada kunjungan</p> <p>Responden 3 : Iya, betul</p> <p>Responden 4: Betul, terdapat kunjungan namun hanya dilakukan sekali saat bulan pertama pasca pinjaman</p> <p>Responden 5 : Iya ada yang datang <i>survey</i></p> <p>Responden 6: Iya, benar</p> <p>Responden 7: Iya benar ada <i>survey</i></p> <p>Responden 8: Iya benar, kunjungan untuk <i>survey</i> lapangan</p> <p>Responden 9: Ya sebagai pantauan</p> <p>Responden 10: Benar , karena untuk mengetahui kesanggupan bayar calon debitur</p> <p>Responden 11: Iya bener, tetapi untuk pinjaman UMKM atau usaha</p>
7	<p>Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?</p>	<p>Responden 1: Betul</p> <p>Responden 2: Tidak, pihak BPR hanya berkunjung sekali, selama tidak telat bayar maka tidak akan dikunjungi sepertinya</p> <p>Responden 3: Benar</p> <p>Responden 4: Benar</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>Responden 5: Benar tapi hanya dilakukan dalam satu bulan pertama setelah pencairan</p> <p>Responden 6: Iya</p> <p>Responden 7: Benar, sesuai dengan pernyataan yang saya setuju</p> <p>Responden 8: Iya, agar dana pinjaman tidak digunakan macam-macam</p> <p>Responden 9: Iya</p> <p>Responden 10: Benar , karena untuk mengetahui sejak dini apakah usaha tersebut berjalan dengan baik atau mengalami penurunan</p> <p>Responden 11: Iya masih</p>
8	Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?	<p>Responden 1: Benar, sebagai pemberitahuan</p> <p>Responden 2: Iya</p> <p>Responden 3: Tidak Tahu</p> <p>Responden 4: Ya, semua nasabah yang datang untuk meminta informasi terkait dengan kredit dijelaskan</p> <p>Responden 5: Iya teguran pertama dulu dilakukan penyemprotan</p> <p>Responden 6: Iya, berupa peringatan dan pemberitahuan</p> <p>Responden 7: Iya sebagai pengingat</p> <p>Responden 8: Iya benar</p> <p>Responden 9: Iya, sebagai notifikasi atas tindakan</p> <p>Responden 10: Benar</p> <p>Responden 11: Iya benar</p>



No	Pertanyaan	Jawaban
9	Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?	<p>Responden 1: Benar</p> <p>Responden 2: Langkah awal sebelum ayda di analisa kembali apakah debitur cukup potensial untuk diberikan restrukturisasi</p> <p>Responden 3: Benar, sesuai dengan apa yang dijelaskan pada saya</p> <p>Responden 4: Sebelum ambil alih jaminan, BPR akan melakukan musyawarah dengan debitur</p> <p>Responden 5: Iya</p> <p>Responden 6: Ya</p> <p>Responden 7: Benar, akan tegas dan sesuai dengan SOP yang berlaku</p> <p>Responden 8: Iya benar</p> <p>Responden 9: Ya, sesuai aturan yang berlaku</p> <p>Responden 10: Terhadap debitur menunggak ada beberapa tahapan terlebih dahulu yang dilakukan oleh bank kota bogor sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan sebelum dilakukan ambil alih jaminan atas persetujuan debitur</p> <p>Responden 11: Sementara hanya teguran dan peringatan saja blm sampai mengambil alih agunan</p>
10	Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?	<p>Responden 1: Sesuai</p> <p>Responden 2: Iya, sudah sesuai</p> <p>Responden 3: Sudah</p> <p>Responden 4: Sudah Sesuai</p> <p>Responden 5: Sudah Sesuai</p> <p>Responden 6: Sudah</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>Responden 7: Sudah</p> <p>Responden 8: Sudah sesuai dengan SOP yang berlaku</p> <p>Responden 9: Ya</p> <p>Responden 10: Sudah</p> <p>Responden 11: Iya</p>
11	<p>Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak Bank Kota Bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%. Apakah benar pihak BPR akan bertindak tegas dengan melakukan AYDA sebagai solusi terakhir?</p>	<p>Responden 1: Dengan melakukan restrukturasi</p> <p>Responden 2: Dengan cara melakukan penagihan secara rutin dan persuasif terhadap nasabah dan berikan solusi terbaik untuk penanganannya</p> <p>Responden 3: Hanya melakukan restrukturisasi</p> <p>Responden 4: Melakukan pendekatan kembali dengan debitur-debitur yang macet, agar mereka mau kembali mengusahakan dan membayar kewajiban mereka.</p> <p>Responden 5: Tidak hanya melakukan restrukturasi</p> <p>Responden 6: Restrukturasi</p> <p>Responden 7: Tidak hanya dilakukan panggilan untuk musyawarah</p> <p>Responden 8: Penagihan secara langsung ke debitur, dan proses AYDA bila mana nasabah sudah tidak ada ke sanggupannya untuk membayar</p> <p>Responden 9: Dilakukan restrukturisasi terlebih dahulu</p> <p>Responden 10: Melakukan penagihan sesuai SOP yang diterapkan di bank kota bogor</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		Responden 11: Dengan cara pengecekan kredit oleh para CMO klo pun macet pihak bank langsung menghubungi nasabah untuk menindak lanjuti kemacetannya

Berdasarkan data pada tabel 4.9 yang berisi data hasil wawancara informan di Perumda BPR Bank Kota Bogor dapat dilihat bahwa dari pertanyaan nomor 1, informan menjawab bahwa mekanisme pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan agar pengajuan kredit dapat berjalan dengan lancar. Pertanyaan nomor 2, informan menjawab bahwa rata-rata informan telah mengetahui mekanisme pengajuan kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor. Dapat dilihat pada pertanyaan nomor 3, informan menjawab bahwa persyaratan dari pengajuan kredit sudah sesuai dengan apa yang penulis lampirkan pada pertanyaan tersebut. Dapat dilihat pertanyaan nomor 4, informan memberikan informasi bahwa pihak *Customer Service* sudah memberikan penjelasan tentang persyaratan pengajuan kredit. Pada pertanyaan nomor 5, responden menjawab bahwa betul calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit. Pertanyaan nomor 6, para informan memberikan informasi kepada penulis bahwa saat kunjungan ke rumah pihak bank melakukan wawancara, mengambil foto tempat usaha, atau mengambil foto agunan yang dijadikan jaminan. Pada pertanyaan nomor 7, informan memberikan informasi bahwa pihak bank melakukan kunjungan *survey* sekali saat permohonan pinjaman diajukan. Pertanyaan nomor 8, informan mengatakan bahwa nasabah yang melakukan wanprestasi akan menerima surat teguran dan surat panggilan. Dapat dilihat pada pertanyaan nomor 9, para informan mengatakan bahwa benar jika debitur melakukan wanprestasi agunan yang dijadikan jaminan akan diambil alih oleh pihak bank. Pada pertanyaan nomor 10, informan mengatakan bahwa mekanisme pengajuan kredit sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang ditetapkan pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor. Pada pertanyaan nomor 11, para informan pada tabel 4.9 mengatakan bahwa restrukturisasi adalah sebuah solusi untuk penanganan permasalahan risiko kredit macet.

#### 4.3.2 Data Reduction

Pada tahapan penelitian ini, data *reduction* yang dilakukan peneliti yaitu dengan menghilangkan atau mengubah kata-kata yang tidak relevan sehingga dapat memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan beberapa pengurangan kata atas jawaban yang diberikan oleh informan terkait hasil dari wawancara, seperti pada pertanyaan berikut:

**Tabel 4. 2 Hasil Reduksi Wawancara**

No	Pertanyaan
1	Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan? <b>Jawaban:</b> A. Penting

No	Pertanyaan
2	<p>Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?</p> <p><b>Jawaban:</b>  A. Mengetahui  B. Tidak Mengetahui</p>
3	<p>Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> <p>Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol> <p><b>Jawaban:</b>  A. Ya betul, sudah sesuai dengan yang dijelaskan</p>
4	<p>Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti pertanyaan diatas?</p> <p><b>Jawaban:</b>  A. Ya sesuai, pihak bank menjelaskan persyaratannya terlebih dahulu</p>
5	<p>Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit dilampiri fotokopi bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah atau tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?</p> <p><b>Jawaban:</b>  A. Iya benar, agar data dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan</p>
6	<p>Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti rumah, bangunan, dan kendaraan), melakukan wawancara dengan pemohon dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?</p> <p><b>Jawaban:</b>  A. Ya benar terdapat kunjungan untuk survei tempat tinggal dan usaha bagi nasabah UMKM</p>
7	<p>Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?</p> <p><b>Jawaban:</b>  A. Tidak ada kunjungan berkala, kunjungan ada saat proses pengajuan saja  B. Ya benar agar dan pinjaman tidak digunakan macam-macam</p>

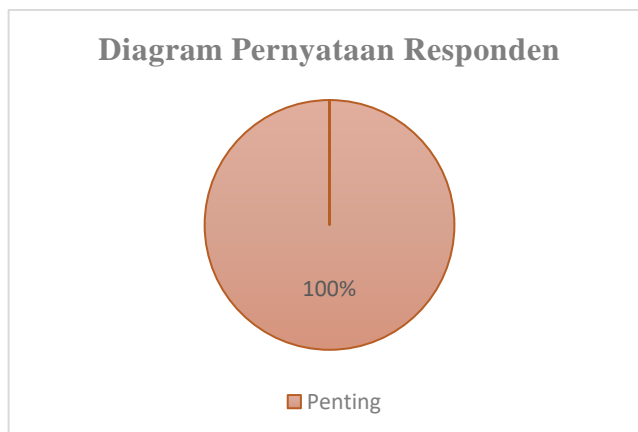
No	Pertanyaan
8	Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur? <b>Jawaban:</b> A. Iya benar, tindakan tersebut dilakukan upaya sebagai peringatan B. Tidak tahu mengenai hal tersebut
9	Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur? <b>Jawaban:</b> A. Tidak sementara hanya teguran dan peringatan tidak langsung melakukan AYDA, karena masih ada beberapa bentuk penyelesaian secara kekeluargaan B. Benar Langsung AYDA
10	Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku? <b>Jawaban:</b> A. Sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Perumda BPR Bank Kota Bogor
11	Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak Bank Kota Bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%. <b>Jawaban:</b> A. Tidak, hanya melakukan restrukturisasi. Jika masih belum melakukan kewajibannya baru akan ada penanganan lebih lanjut namun tidak sampai agunan diambil alih

Berdasarkan tabel 4.10 yang berisi hasil wawancara yang telah direduksi dapat dilihat pada pertanyaan nomor 1, data yang direduksi dan klasifikasi menghasilkan jawaban responden yang lebih dominan menjawab 'Iya benar, agar data dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut karena mekanisme pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan. Pada pertanyaan nomor 2 menghasilkan sebagian responden menjawab 'Mengetahui' dan sebagian lagi 'Tidak Mengetahui'. Hal ini dikarenakan Sebagian responden sudah mengetahui mekanisme pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor, Sebagian lagi tidak. Pada pertanyaan nomor 3 responden menjawab 'Ya betul, sudah sesuai dengan yang dijelaskan'. Hal ini dikarenakan benar adanya persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti yang sudah dijelaskan pada tabel di atas. Pada pertanyaan nomor 4 responden menjawab 'Ya sesuai, pihak bank menjelaskan persyaratannya terlebih dahulu'. Hal ini dikarenakan pihak *Account Officer* atau *Customer Service* menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti pertanyaan diatas. Pada pertanyaan nomor 5, responden menjawab 'Iya benar, agar data dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan'. Hal ini karena benar adanya bahwa calon debitur

diharuskan mengisi formulir permohonan kredit dilampiri fotokopi bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah atau tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan. Pada pertanyaan nomor 6, responden menjawab ‘Ya benar terdapat kunjungan untuk survei tempat tinggal dan usaha bagi nasabah UMKM’. Hal ini dikarenakan benar bahwa ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti rumah, bangunan, dan kendaraan), melakukan wawancara dengan pemohon dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur. Pada pertanyaan nomor 7, sebagian responden menjawab ‘Tidak ada kunjungan berkala, kunjungan ada saat proses pengajuan saja’ dan sebagian lagi ‘Ya benar agar dan pinjaman tidak digunakan macam-macam’ Hal ini dikarenakan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal dan ada juga yang tidak. Pada pertanyaan nomor 8, sebagian responden menjawab ‘Iya benar, tindakan tersebut dilakukan upaya sebagai peringatan’ sebagian lagi ‘Tidak tahu mengenai hal tersebut’. Pada pertanyaan nomor 9, sebagian responden menjawab ‘Tidak sementara hanya teguran dan peringatan tidak langsung melakukan AYDA, karena masih ada beberapa bentuk penyelesaian secara kekeluargaan’ sebagian lagi ‘Benar Langsung AYDA’. Pada pertanyaan nomor 10, responden menjawab ‘Sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Perumda BPR Bank Kota Bogor’. Hal ini dikarenakan pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu untuk pertanyaan nomor 11, responden menjawab ‘Tidak, hanya melakukan restrukturisasi. Jika masih belum melakukan kewajibannya baru akan ada penanganan lebih lanjut namun tidak sampai agunan diambil alih’. Hal ini dikarenakan pihak Bank BPR hanya melakukan restrukturisasi saja.

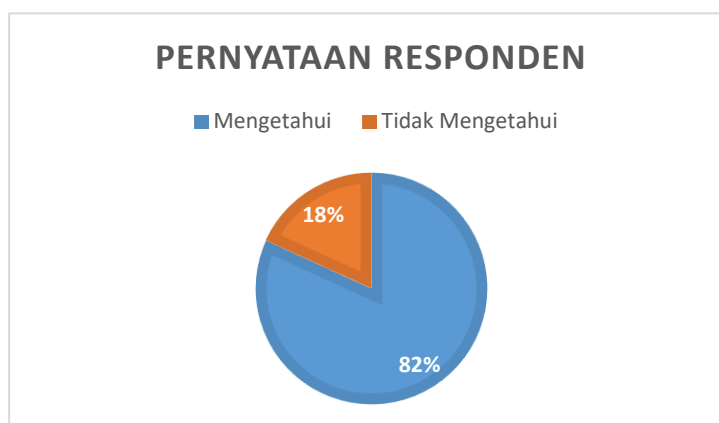
#### **4.3.3 Data Display**

Data *display* yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyusun data yang relevan dan mengklasifikasikan seluruh jawaban responden kedalam tiap-tiap jawaban yang memiliki artian yang sama agar menjadi sebuah informasi yang dapat disimpulkan juga memiliki makna. Pada tahap ini data observasi dan dokumentasi wawancara peneliti lampirkan sebagai berikut:



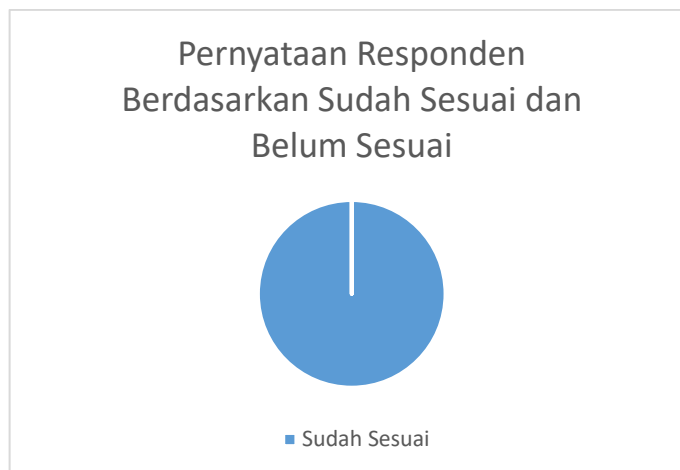
**Gambar 4.12 Pernyataan Responden Berdasarkan Penting dan Tidak Penting**

Berdasarkan data pada gambar 4.12 yang berisi pernyataan responden yang menjelaskan bahwa seluruh responden yang berjumlah 11 informan pada penelitian ini setuju bahwa mekanisme pengajuan kredit penting untuk dilakukan agar proses pengajuan kredit dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan dan SOP yang ditetapkan Pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme berperan sangat penting untuk kelancaran pengajuan kredit.



**Gambar 4.13 Pernyataan Responden Berdasarkan Mengetahui dan Tidak Mengetahui**

Berdasarkan pada tabel 4.12 dan gambar 4.13 yang berisi pernyataan responden yang menjelaskan bahwa dari total seluruh 11 informan terdapat beberapa informan yang tidak mengetahui terkait mekanisme pengajuan pinjaman kredit. Jumlah informan yang tidak mengetahui mekanisme pengajuan kredit dapat dilihat dari gambar 4.13 yaitu terdapat 2 informan yang masih belum mengetahui mekanisme pengajuan kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada ketidaksamaan pernyataan antara responden satu dengan responden lainnya dan ini perlu di analisis kembali.



**Gambar 4.14 Pernyataan Responden Berdasarkan Sudah Sesuai dan Belum Sesuai**

Berdasarkan pada gambar 4.14 yang berisi tentang pernyataan-pernyataan responden saat wawancara mengenai persyaratan pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor apakah sudah sesuai dengan mekanisme pengajuan kredit atau masih belum sesuai. Dapat dilihat pada gambar 4.14 seluruh informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa persyaratan pengajuan kredit sudah sesuai dengan mekanisme pengajuan yang ditetapkan oleh Perumda Bank Kota Bogor. Dapat disimpulkan bahwa pada mekanisme pengajuan kredit tahapan ini tidak perlu dilakukan analisis kembali secara mendalam.



**Gambar 4.15 Pernyataan Responden Berdasarkan Sesuai atau Tidak Sesuai Mengenai Penjelasan Persyaratan Kredit**

Berdasarkan pada gambar 4.15 yang berisi mengenai penjelasan persyaratan pengajuan kredit pada nasabah Perumda BPR Bank Kota Bogor, dalam pernyataannya pihak BPR Bank Kota Bogor sudah menjalankan mekanisme tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada data diatas bahwa 11 informan penelitian mengatakan benar bahwa pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor memberikan penjelasan tentang persyaratan tersebut sebelum permohonan kredit diajukan. Dapat



disimpulkan bahwa pada mekanisme tahapan ini tidak perlu dilakukan analisis kembali secara mendalam karena sudah sesuai dengan SOP.



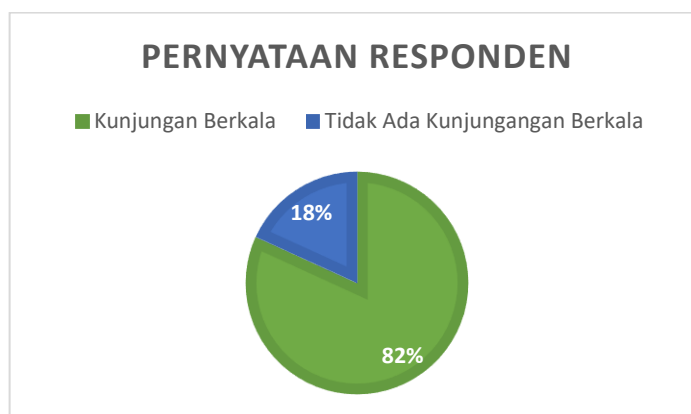
**Gambar 4.16 Pernyataan Responden Berdasarkan Benar atau Tidak Benar Mengenai Penjelasan Persyaratan Kredit**

Berdasarkan pada gambar 4.16 yang berisi mengenai kelengkapan persyaratan pengajuan kredit dan kunjungan lapangan pada nasabah Perumda BPR Bank Kota Bogor, dalam pernyataan tersebut seluruh informan penelitian ini menjelaskan bahwa pihak BPR Bank Kota Bogor benar menjalankan mekanisme tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada data diatas bahwa 11 informan penelitian mengatakan benar bahwa calon debitur Perumda BPR Bank Kota Bogor diharuskan melengkapi kelengkapan persyaratan pengajuan kredit agar dapat dilakukan kunjungan lapangan oleh pihak Bank BPR agar data permohonan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat disimpulkan bahwa pada tahapan ini tidak perlu dilakukan analisis kembali secara mendalam karena sudah sesuai dengan SOP BPR Bank Kota Bogor.



**Gambar 4.17 Pernyataan Responden Mengenai Kunjungan Survey Lapangan**

Berdasarkan gambar 4.17 yang berisi mengenai kunjungan tempat tinggal atau usaha dan wawancara pada nasabah Perumda BPR Bank Kota Bogor, dalam pernyataan tersebut seluruh informan penelitian ini menjelaskan bahwa pihak BPR Bank Kota Bogor benar menjalankan mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan SOP. Hal ini dapat dilihat pada data diatas bahwa 11 informan penelitian mengatakan benar bahwa calon debitur Perumda BPR Bank Kota Bogor melakukan kunjungan tempat tinggal, usaha, dan juga wawancara pada proses pengajuan kredit. Pada pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh informan memberikan pendapat yang sama dan tidak ada perbedaan jawaban, maka pada pernyataan ini tidak perlu dilakukan analisis secara mendalam.



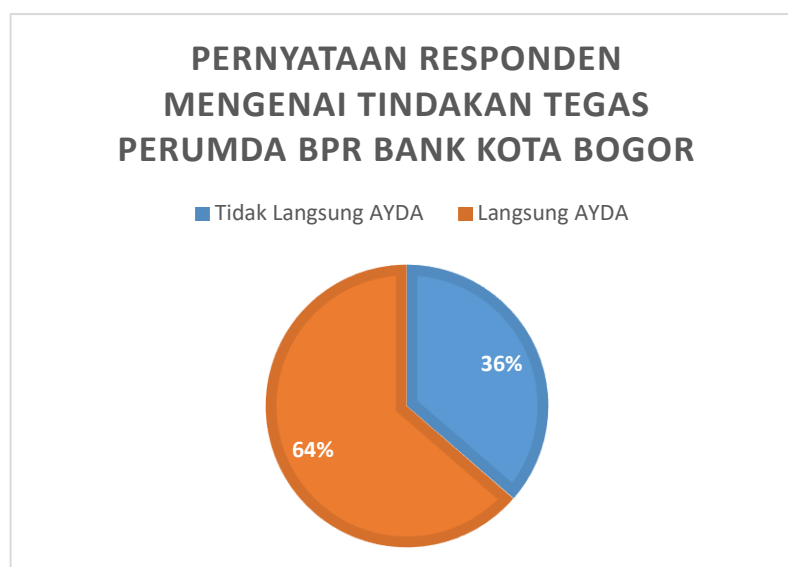
**Gambar 4.18 Pernyataan Responden Mengenai Pengawasan Kredit**

Berdasarkan gambar 4.18 yang berisi mengenai kunjungan tempat tinggal atau usaha dan wawancara pada nasabah Perumda BPR Bank Kota Bogor, dalam pernyataan tersebut 82% informan menjelaskan bahwa pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor benar melakukan pengawasan kredit dengan melakukan kunjungan secara berkala, sedangkan 18% informan berkata bahwa tidak ada kunjungan secara berkala upaya dalam pengawasan kredit. Dapat disimpulkan pada pernyataan ini bahwa terdapat perbedaan pendapat antara informan satu dengan informan lainnya, maka pada pernyataan ini perlu dilakukan analisis kembali menggunakan analisis kasus negatif.



**Gambar 4.19 Diagram Pernyataan Responden Mengenai Surat Teguran**

Berdasarkan gambar 4.19 yang berisi mengenai surat teguran yang dikirimkan ke alamat debitur Perumda BPR Bank Kota Bogor, dalam pernyataan tersebut 91% informan menjelaskan bahwa pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor benar melakukan pengiriman surat teguran untuk mengingatkan nasabah agar segera menyelesaikan kewajibannya, sedangkan 9% informan berkata bahwa tidak ada surat teguran yang dikirimkan pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor ke alamat debitur. Dapat disimpulkan pada pernyataan ini bahwa terdapat perbedaan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya, maka pada pernyataan ini perlu dilakukan analisis kembali menggunakan analisis kasus negatif.



**Gambar 4.20 Diagram Pernyataan Responden Mengenai Tindakan Tegas Perumda BPR Bank Kota Bogor**

Berdasarkan gambar 4.20 yang berisi mengenai tindakan tegas yang dilakukan pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor debitur yang bermasalah. Dapat dilihat pada tabel dan gambar diatas 64% informan menjelaskan bahwa tindakan tegas yang

dilakukan pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor agar menekankan risiko kredit bermasalah/macet yaitu dengan melakukan tindakan Aset Yang Diambil Alih (AYDA), sedangkan 36% informan menjelaskan bahwa pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor tidak langsung mengambil agunan sebagai tindak penyelesaian kredit tetapi masih ada beberapa tahapan penyelesaian kredit yang dilakukan pihak BPR Bank Kota Bogor. Dapat disimpulkan bahwa pada pernyataan ini terdapat perbedaan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya, maka pada pernyataan ini perlu dilakukan analisis kembali menggunakan analisis kasus negatif.



**Gambar 4.21 Diagram Pernyataan Kesesuaian Mekanisme Kredit**

Berdasarkan gambar 4.21 yang berisi mengenai kesesuaian mekanisme kredit yang dilakukan pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor. Dapat dilihat pada tabel dan gambar diatas 100% informan atau seluruh informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan kredit yang dilakukan BPR sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa pada pernyataan ini mekanisme kredit sudah sesuai dengan prosedur, maka tidak perlu dilakukan analisis kembali secara mendalam.



**Gambar 4.22 Diagram Pernyataan Responden Mengenai Penanganan Risiko Kredit Macet**

Berdasarkan gambar 4.22 yang berisi mengenai penanganan risiko kredit macet yang dilakukan pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor debitur yang bermasalah. Dapat dilihat pada tabel dan gambar diatas 100% informan atau seluruh dari informan penelitian yang berjumlah 11 informan menjelaskan bahwa penanganan yang dilakukan pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor agar menekankan risiko kredit bermasalah/macet yaitu dengan melakukan tindakan restrukturisasi atau keringanan pembayaran sebagai tahap penekanan nilai NPL yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pada pernyataan ini tidak ada perbedaan pernyataan responden satu dengan responden lainnya, maka pada pernyataan ini tidak perlu dilakukan analisis kembali menggunakan analisis kasus negatif.

#### **4.4 Uji Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini temuan atau data yang dapat diuji yaitu data observasi, wawancara, dan dokumentasi pada objek yang diteliti yaitu mekanisme pengajuan pinjaman kredit (Studi Perumda BPR Bank Kota Bogor). Dengan demikian realitas dalam penelitian ini bersifat dinamis atau dapat berubah seiring dengan waktu sehingga tidak ada yang konsisten atau tetap.

Dalam uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan uji *transferability* (validitas *eksternal*) dan uji *confirmability*.

##### **4.4.1 Uji Kredibilitas**

Uji kredibilitas pada penelitian ini mengacu kepada 3 jenis, yaitu Perpanjangan Pengamatan, Triangulasi, dan Analisis Negatif. Perpanjangan pengamatan diawali dengan penelitian narasumber yang dijadikan sebagai sampel penelitian berjumlah 9 narasumber, namun penguji menambah 2 narasumber dengan total 11 narasumber agar penelitian yang dilakukan lebih valid dan memiliki jawaban yang variatif sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

Triangulasi dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik dalam penelitian ini dicapai dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menanyakan pertanyaan berbeda dengan tujuan atau maksud yang sama akan menunjukkan apakah jawaban yang diberikan oleh narasumber bersifat valid dan sesuai dengan pemahamannya atau dengan merubah sebuah pertanyaan akan merubah pemikiran narasumber dengan memberikan hasil jawaban yang berbeda. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbeda namun hasil yang sama tetap memberikan jawaban dengan maksud yang sama sesuai dengan informasi atau hal yang narasumber terima.

Analisis kasus negatif terjadi apabila terdapat jawaban dengan hasil yang berbeda setelah pergantian pertanyaan yang membuat jawaban tersebut tidak valid dan perlu dipertanyakan kembali terkait dengan pemahaman yang narasumber yakini mengenai kegiatan ataupun informasi yang diterima dari BPR Bank Kota Bogor. Analisis kasus negatif pada penelitian ini ditunjukkan pada pertanyaan yang menyangkut ketidaksamaan hasil wawancara dari responden pegawai BPR Bank Kota Bogor dengan hasil wawancara dari responden nasabah di BPR mengenai proses pengajuan kredit pada BPR Bank Kota Bogor. Dilihat pada tabel 4.10 yang berisi hasil reduksi wawancara, pada pernyataan pertanyaan nomor 2, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9 terdapat perbedaan pendapat antara informan satu dengan informan lainnya. Pada kasus ini jika terdapat perbedaan pernyataan tersebut maka perlu dilakukan analisis kasus negatif untuk penyelesaiannya. Nasabah yang tidak mengetahui prosedur tersebut dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak BPR Bank Kota Bogor agar pengajuan kredit dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir terjadinya kesalahan informasi ataupun komunikasi antara nasabah dengan pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor.

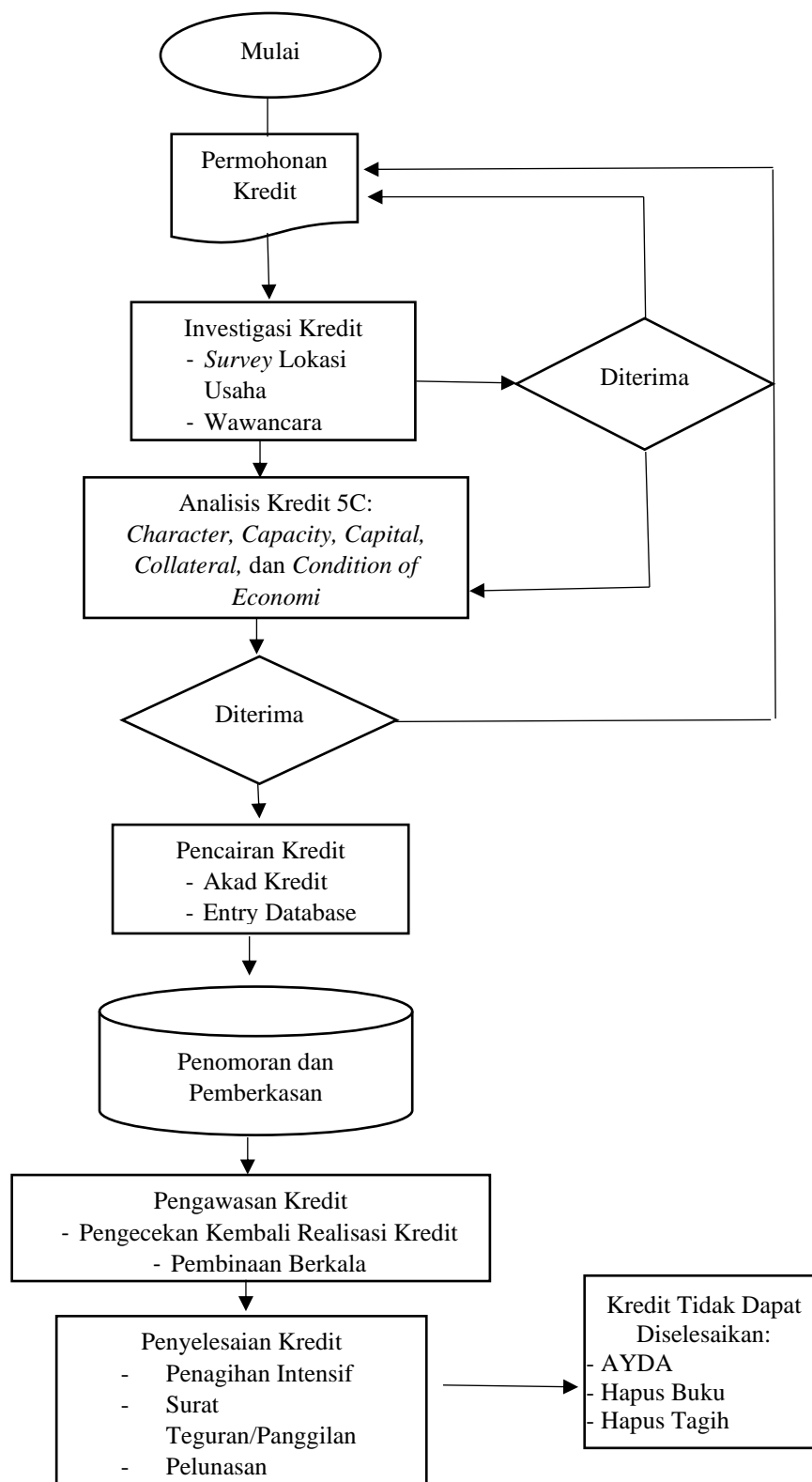
#### **4.4.2 Uji *Confirmability***

Dalam penelitian ini uji *confirmability* yang dilakukan yaitu melakukan konfirmasi terhadap hasil penelitian dengan proses yang dilakukan kepada pihak *internal* pengambil keputusan yaitu manajer kredit dan direksi untuk memberikan konfirmasi terkait perbedaan hasil wawancara antara pihak *internal* yaitu pegawai Perumda BPR Bank Kota Bogor dengan pihak eksternal yaitu nasabah Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Data dalam penelitian ini telah dikonfirmasi dari awal proses hingga hasil penelitian yang didukung dengan melampirkan lampiran data observasi, dokumentasi wawancara, dan dokumen pendukung penelitian. Sesuai dengan pertanyaan Nomor 7 pada kuesioner wawancara, pihak Bank BPR menjelaskan bahwa pihaknya melakukan kunjungan setiap bulan untuk dilakukan *survey* selama waktu jatuh tempo untuk meninjau terkait kelancaran usaha debitur. Sedangkan pihak nasabah menjelaskan bahwa pihak Bank BPR hanya melakukan kunjungan sekali pasca pinjaman dan seterusnya tidak ada kunjungan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kontradiktif antara penjelasan pihak BPR dengan pihak debitur.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Mekanisme Pengajuan Kredit Pada Perumda BPR Bank Kota Bogor



**Gambar 4.23** *Flow Chart* Mekanisme Pengajuan Kredit

1. *Account Officer* atau *Customer Service* menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit, yang meliputi:
  1. Fotokopi KTP Pemohon
  2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon
  3. Fotokopi Kartu Keluarga
  4. Fotokopi Surat Nikah
  5. Pas Foto Suami Istri

Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan:

  1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)
  2. Slip gaji dan daftar tunjangan
  3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, *leasing*)
2. Calon debitur mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan kemudian dilakukan pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK, seperti:
  1. Cari riwayat informasi pemohon dari file kredit dan SLIK.
  2. Jika riwayatnya tidak baik atau terdapat kredit macet, maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk ditolak.
  3. Teliti riwayat bidang usaha yang ditekuni pemohon, apakah usahanya ilegal atau sektor yang harus dihindari, maka permohonan kredit ditolak.
  4. Instruksi untuk survei lapangan.
3. *Account Officer* meneliti kelengkapan permohonan kredit dan kondisi usaha melalui wawancara dan survei lokasi. Jika dianggap layak, proses dilanjutkan pada analisis yang lebih mendalam, seperti:
  1. Kunjungi tempat tinggal dan tempat usaha pemohon dan lakukan:
    - a. Foto tempat tinggalnya
    - b. Foto tempat usahanya (kredit modal kerja atau investasi)
    - c. Foto agunan (rumah, bangunan, kendaraan, dll)
    - d. Wawancara pemohon dan keluarga pemohon.
    - e. Lakukan juga pengamatan harta atau aktivitas usahanya.
    - f. Lakukan penilaian terhadap karakter pemohon.
    - g. Kumpulkan data penghasilan dan pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga. Jika memungkinkan, dapatkan informasi dari lingkungan sekitarnya tentang si pemohon.
  2. Buat laporan survei dan serahkan kepada Kepala Bagian Marketing
4. Petugas *Account Officer* melakukan penilaian tingkat kelayakan usaha untuk penentuan besarnya kredit dan jangka waktu kredit.
5. Hasil penilaian disampaikan kepada komite kredit untuk dipertimbangkan apakah disetujui atau ditolak. Komite Kredit membuat rekomendasi kepada Pejabat Pemutus Kredit untuk memperoleh persetujuan lebih lanjut. Jika diperoleh persetujuan, proses dilanjutkan ke tahap pencairan kredit. Berikut data yang diperlukan untuk membuat rekomendasi kredit:



6. Bagian Administrasi Kredit membuat Surat Perjanjian Pinjaman Uang (SPPU) atau akad kredit, meregistrasikan data calon debitur dan memasukkannya ke *database*.
7. Berkas kelengkapan administrasi kredit dan jaminan asli debitur yang telah dicairkan kreditnya, ditatausahakan dan dimasukkan kedalam ruang khasanah.
8. Pengawasan kredit senantiasa dilakukan selama jangka waktu kontrak atau sampai dengan kredit dilunasi yang meliputi pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit dan upaya pencegahan jika terjadi *Non Performing Loan*.
9. Penyelesaian kredit merupakan tahap akhir dimana debitur melunasi kreditnya, namun pada kondisi debitur bermasalah, penyelesaian dilakukan melalui Surat Teguran, Surat Panggilan, Surat Peringatan dan mekanisme lain yang ditetapkan oleh Direksi Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Mekanisme pengajuan pinjaman kredit pada perbankan umumnya tidak memiliki perbedaan antara satu perbankan dengan bank yang lainnya. Perbedaan mekanisme pengajuan kredit Perumda BPR Bank Kota Bogor memiliki perbedaan hanya pada bagian persyaratan pemberian kredit kepada nasabah Swasta dengan nasabah Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahapan mekanisme pengajuan kredit Perumda BPR Bank Kota Bogor menerapkan mekanisme seperti berikut:

#### 1. Permohonan Kredit

Dalam hal ini nasabah mengajukan permohonan kredit pada Perumda BPR Bank Kota Bogor dengan melengkapi data diri pemohon dan pasangan dilengkapi dengan berkas-berkas lainnya yang berisi, antara lain:

##### a. Surat Keterangan kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun

Surat keterangan kontrak atau surat keterangan pangkat penting digunakan saat pengajuan kredit yang diajukan oleh nasabah Pegawai Negeri Sipil yang akan dijadikan sebagai agunan penjamin kepada pihak perbankan Perumda BPR Bank Kota Bogor.

##### b. Slip gaji dan Daftar Tunjangan

Slip gaji atau daftar tunjangan seperti yang dikhususkan khusus nasabah Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai alat analisis untuk pihak analis melakukan perhitungan limit yang bisa didapatkan oleh pemohon kredit dan sebagai bahan pertimbangan analis seberapa besar kemampuan pembayaran yang bisa dilakukan oleh pemohon kredit.

##### c. Kwitansi Potongan Pinjaman Lain (Koperasi, bank lain, *leasing*)

Berkas lampiran catatan potongan pinjaman lainnya dari bank maupun non-bank sangat penting dilampirkan sebagai berkas permohonan kredit. Catatan potongan pinjaman membantu pihak analis untuk meninjau dan memberikan keputusan serta perhitungan maksimal limit yang bisa didapatkan nasabah setelah dipotong

dengan pinjaman lain disertai dengan slip gaji guna melihat kemampuan bayar kredit pemohon.

## 2. Investigasi Kredit

Dalam tahapan mekanisme pengajuan kredit setelah permohonan kredit diterima pihak bank, mekanisme yang dilakukan selanjutnya adalah investigasi lokasi dan wawancara. Investigasi dilakukan pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor dengan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat perkembangan usaha atau agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit serta dilakukan wawancara singkat dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*).

## 3. Pencairan Kredit

Mekanisme pencairan kredit dilakukan setelah pemohon kredit lolos pada tahapan investigasi dan wawancara oleh pihak analis Perumda BPR Bank Kota Bogor. Mekanisme pencairan yang dilakukan yaitu dengan dilakukannya akad kredit yang wajib dihadirkan oleh pemohon kredit dengan pasangan pemohon. Pada tahapan pencairan kredit, pemohon menandatangani perjanjian-perjanjian pinjaman yang tidak boleh dilakukan dan konsekuensi jika pemohon melakukan wanprestasi.

## 4. Penomoran dan Pemberkasan

Dalam hal ini lembar pengajuan kredit pemohon diberikan nomor CIF (*Customer Information File*) masing-masing pemilik rekening. Penomoran berkas ini dilakukan setelah akad kredit antara pemohon dan admin kredit selesai dilaksanakan. Pada tahap setelah penomoran berkas pihak admin kredit menyimpan seluruh dokumen pemohon kredit pada tempat khusus penyimpanan agunan.

## 5. Pengawasan Kredit

Pembinaan kredit merupakan sebuah upaya pembinaan yang berkesinambungan dari mulai tahap pencairan kredit hingga kredit dibayar lunas termasuk bagaimana menemukan pemecahan masalah yang dilakukan pejabat bank yang berwenang. Pada mekanisme pembinaan kredit ini dilakukan untuk menjaga agar pemohon yang telah difasilitasi pinjaman menggunakan kredit nya sesuai dengan syarat dan tujuan pengajuan kredit yang telah disepakati dan mengikuti perkembangan usaha nasabah guna menemukan solusi untuk memecahkan masalah agar terhindar dari terjadinya penurunan nilai kredit. Dalam mekanisme pengajuan kredit pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor seharusnya melakukan pembinaan secara berkala kepada nasabah dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha untuk pengecekan kembali realisasi kredit, mengamati apakah manajemen perusahaan terpelihara dengan baik, dan meneliti seberapa jauh kemungkinan pengembangan kredit pada sektor usaha nasabah yang bersangkutan.

## 6. Penyelesaian Kredit

Penyelesaian kredit dilakukan pejabat bank terhadap nasabah yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian-perjanjian utang piutang yang disepakati pada akad kredit. Pada mekanisme ini

biasanya pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor menjalankan mekanismenya dengan memberikan surat teguran dan penagihan secara insentif, jika dari pihak nasabah tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya pihak bank akan bersikap tegas dengan mengambil Aset Yang Diambil Alihkan (AYDA) sebagai solusi pemecahan permasalahan kredit macet. Menurut Surhajo, Aset Yang Diambil Alih (AYDA) merupakan asset yang diperoleh Bank Perkreditan Rakyat untuk penyelesaian kredit, dengan melalui pelelangan atau di luar dari itu berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pada surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan.

Berdasarkan mekanisme pengajuan pinjaman kredit yang diterapkan oleh Perumda BPR Bank Kota Bogor didapatkan hasil analisa sebagai berikut:

1. Terdapat 2 responden yang tidak mengetahui mengenai teknis pengajuan kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor, namun pihak BPR menyadari bahwa SOP pengajuan pinjaman kredit penting untuk diketahui nasabah terlebih dahulu sebelum mengajukan kredit pinjaman. Pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor akan menjelaskan SOP nya terlebih dahulu kepada calon nasabah sebelum dilanjutkan kepada tahapan berikutnya.
2. Dalam proses pengajuan kredit, terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi nasabah sesuai dengan ketentuan pihak BPR Kota Bogor, seperti:
  - 1) Fotokopi KTP Pemohon
  - 2) Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon
  - 3) Fotokopi Kartu Keluarga
  - 4) Fotokopi Surat Nikah
  - 5) Pas Foto Suami Istri

Apabila pemohon merupakan PNS, maka dilengkapi dengan:

  - 1) SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)
  - 2) Slip gaji dan daftar tunjangan
  - 3) Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)
3. Setelah berkas administrasi sudah dilampirkan, pihak BPR akan meninjau lokasi tempat usaha, tempat tinggal, ataupun agunan yang menjadi jaminan pemohon. Pihak Bank BPR juga mengumpulkan informasi terkait penghasilan ataupun pengeluaran yang dilakukan oleh keluarga pemohon.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa baik pihak kreditur maupun debitur harus mengetahui dan menyetujui semua ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pengajuan kredit dapat berjalan dengan lancar dan jelas agar meminimalisir terjadinya kesalahpahaman.

#### **4.5.2 Analisis Mekanisme Pengajuan Kredit Perumda BPR Bank Kota Bogor**

Analisis dilakukan dengan pendekatan wawancara pada informan *internal* dan *eksternal* untuk mengetahui informasi penelitian. Analisis dihasilkan dari pengamatan yang terdiri dari kesesuaian mekanisme pengajuan kredit yang diterapkan dengan prosedur pengajuan kredit yang ditetapkan. Proses analisis terdiri dari tahapan-tahapan

prosedur pengajuan pinjaman kredit Perumda BPR Bank Kota Bogor, mekanisme yang dijalankan, dan bagaimana menangani kredit bermasalah. Analisis dilakukan terhadap data serta informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan *eksternal* dan *internal*, dokumentasi, dan triangulasi.

Berdasarkan tabel 4.11 mengenai *flow chart* mekanisme pengajuan kredit, informan menjelaskan bahwa prosedur yang ditetapkan oleh pihak BPR sudah sesuai dengan apa yang diimplementasikan kepada calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman kredit. Pada tahap ini tidak ditemukan adanya kendala ataupun ketidaksesuaian mekanisme dengan SOP yang berlaku pada saat proses pengajuan, namun pada saat pasca peminjaman terdapat perbedaan penjelasan antara pihak BPR dengan nasabah. Berikut adalah perbedaan pernyataan informan pegawai dengan informan nasabah, sebagai berikut:

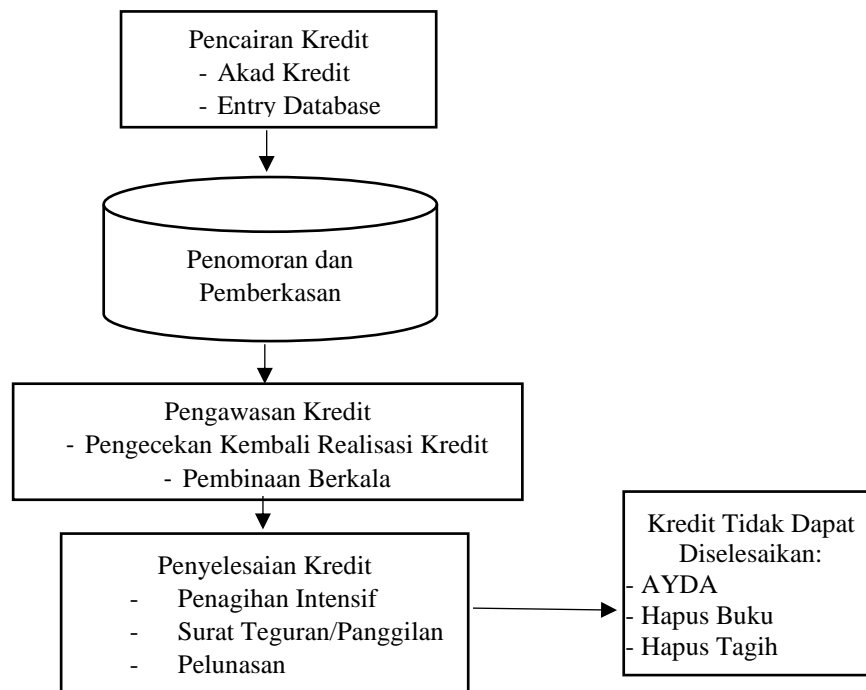
**Tabel 4. 3 Pernyataan Informan Penelitian**

No	Pertanyaan	Pernyataan Responden
1	Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?	1. <i>Customer Service</i> : Iya, masih. 2. <i>Credit Marketing</i> : Iya 3. <i>Analisis Kredit 1</i> : Iya 4. <i>Nasabah PNS 1</i> : Benar 5. <i>Nasabah PNS 2</i> : Benar tetapi hanya dilakukan dalam satu bulan pertama setelah pencairan 6. <i>Nasabah Swasta 1</i> : Benar, sesuai dengan perjanjian yang saya setuju 7. <i>Nasabah Swasta 2</i> : Betul 8. <i>Analisis Kredit 2</i> : Tidak, pihak BPR hanya berkunjung sekali, selama tidak telat bayar maka tidak akan dikunjungi
	Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?	9. <i>Account Officer</i> : Benar, karena untuk mengetahui sejak dini apakah usaha tersebut berjalan dengan baik atau mengalami penurunan 10. <i>Admin kredit</i> : Benar 11. <i>Chief Marketing Officer (CMO)</i> : Iya agar dana pinjaman tidak digunakan diluar kredit yang direalisasikan.

Berdasarkan Tabel 4.22 tentang pernyataan informan penelitian, pihak informan Perumda BPR Bank Kota Bogor menjelaskan bahwa pihaknya melakukan kunjungan berkala setiap bulan selama waktu jatuh tempo untuk meninjau terkait kelancaran usaha nasabah dan realisasi kredit, sedangkan pihak informan nasabah menjelaskan bahwa pihak BPR hanya melakukan kunjungan sekali pasca pinjaman

dan seterusnya tidak ada kunjungan kembali. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam SOP dan mekanisme yang dijelaskan Pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel 4.12 tentang Pernyataan Informan, pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor tidak meninjau secara berkala terkait dengan dana yang dipinjamkan apakah digunakan sesuai dengan permohonan yang telah diajukan atau digunakan kepada hal lain diluar perjanjian. Apabila terdapat peninjauan lapangan hanya akan dilakukan satu bulan pertama pasca pencairan dana, hal ini menjadi perhatian bagi peneliti mengingat peninjauan pasca pinjaman juga penting dilakukan untuk melihat apakah usaha ataupun kegiatan yang nasabah lakukan berjalan dengan lancar atau tidak agar risiko kredit macet yang terjadi dapat diatasi atau diminimalisir.



**Gambar 4.24 Flow Chart Pengawasan Kredit**

Apabila terdapat kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak Perumda BPR Bank Kota Bogor memiliki beberapa prosedur yang dilakukan sebelum mengambil alih agunan debitur yang menjadi jaminan saat proses pinjaman kredit, yaitu:

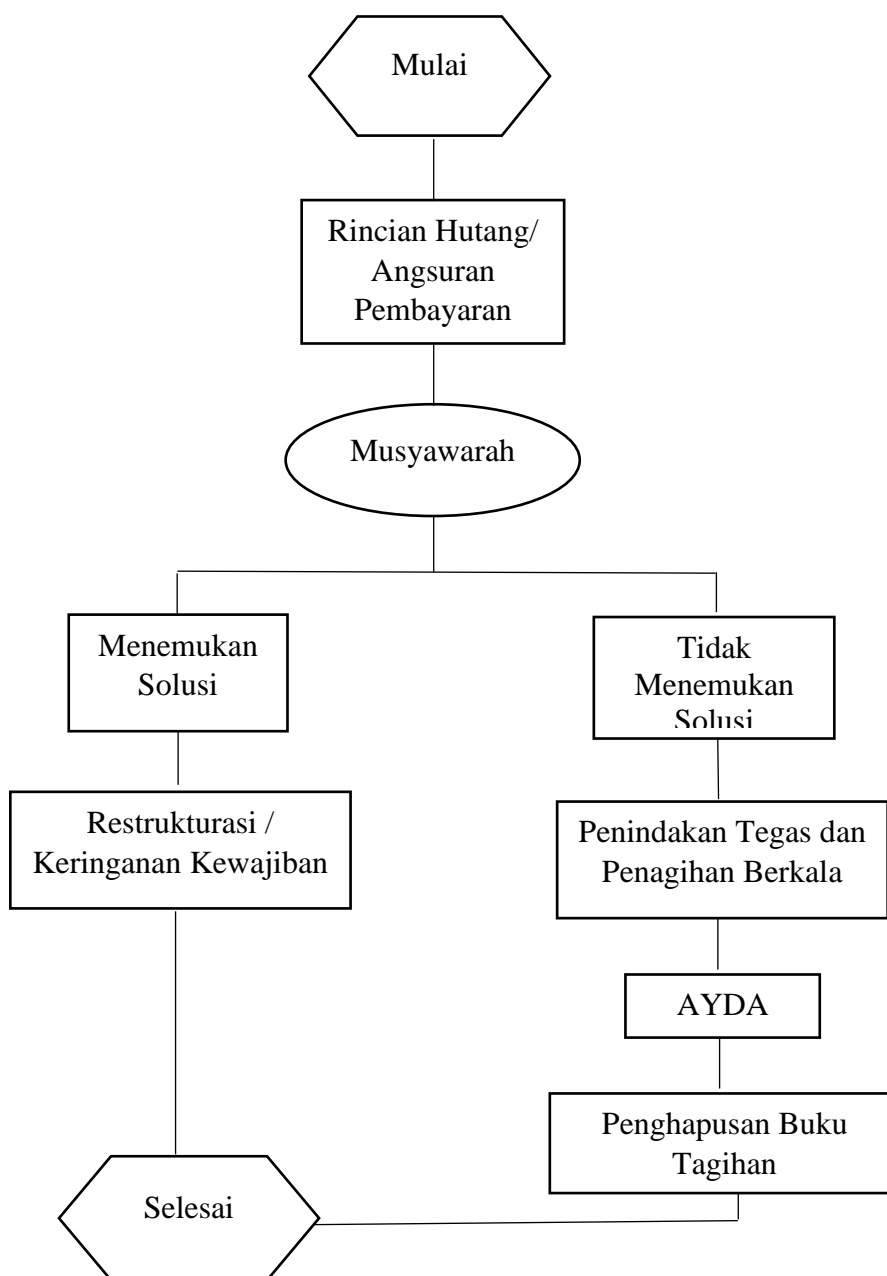
- 1) Dalam hal debitur bermasalah, setelah keterlambatan 30 hari debitur akan dilakukan wawancara melalui telepon untuk menanyakan apakah ada kendala untuk pembayaran kreditnya. Untuk surat teguran bisa diterbitkan setelah debitur terlambat lebih dari 3 bulan

- 2) Perlu adanya musyawarah antara pihak debitur dan kreditur dengan cara melakukan penagihan secara rutin dan persuasif terhadap nasabah dan berikan solusi-solusi terbaik untuk penanganannya
- 3) Sebelum mengambil alih jaminan, Bank Kota Bogor akan melakukan musyawarah dengan debitur yg macet tersebut. Jika masih ada kemauan untuk membayar dari pihak debitur dengan pembayaran lebih kecil dari angsuran seharusnya Bank Kota Bogor akan memberikan kesempatan nasabah tersebut untuk melunasi. Namun jika kondisi nasabah benar-benar sudah tidak bisa membayar pihak Bank Kota Bogor akan mengambil alih jaminan tersebut.

Salah satu langkah yang diambil pihak BPR Bank Kota Bogor dalam menangani kredit macet yaitu dengan melakukan restrukturasi. Dalam hal ini, teknis yang ditentukan yaitu seperti menurunkan suku bunga kredit, memperpanjang tenor, mengurangi tunggakan hingga menkonversi kredit yang ada menjadi dana penyertaan modal sementara.

#### **4.5.3 Cara Perumda BPR Bank Kota Bogor Mengatasi Risiko Kredit Macet**

Risiko kredit macet merupakan salah satu kendala pasca pinjaman yang terjadi pada nasabah yang kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit yang telah diajukan. Dalam menanggulangi kredit macet, pihak BPR menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam mengatasi kredit macet sebelum agunan nasabah diambil alih oleh pihak BPR. Pertama pihak BPR akan melakukan musyawarah dengan pihak nasabah guna membicarakan apa yang menjadi kendala mereka dalam melaksanakan kewajibannya, apabila telah dilakukan musyawarah maka pihak BPR akan melakukan restrukturasi guna meringankan kewajiban nasabah agar angsuran dapat terpenuhi. Setelah restrukturasi dilakukan, nasabah tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka cara terakhir yang akan diambil yaitu dengan mengambil alih agunan yang telah disepakati di awal.



**Gambar 4.25** *Flowchart Mengatasi Kredit Macet*

Dalam mengajukan kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor calon debitur memiliki kewajiban pembayarannya masing-masing sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Apabila terdapat kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, pihak BPR akan melakukan musyawarah dengan pihak nasabah guna membicarakan apa yang menjadi kendala mereka dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila telah dilakukan musyawarah dan ditemukan solusi yang tepat dan dapat dilaksanakan, maka pihak BPR akan melakukan restrukturasi guna meringankan kewajiban nasabah agar angsuran dapat terpenuhi. Apabila setelah melakukan restrukturasi nasabah tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak ditemukan lagi solusi yang tepat, maka cara terakhir yang akan diambil yaitu dengan mengambil alih agunan yang telah disepakati di awal.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “ANALISIS MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN KREDIT (STUDI KASUS PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR)”, sudah berjalan dengan baik dan mengikuti SOP yang telah ditentukan, namun terdapat beberapa kekurangan yang peneliti temukan pada BPR Bank Kota Bogor. Adapun simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur yang ditentukan oleh pihak BPR Bank Kota Bogor menunjukkan bahwa validasi data, teknis pinjaman, hingga kemampuan pembayaran merupakan hal penting yang perlu diketahui sebelum melakukan pinjaman kredit. Nasabah yang ingin melakukan pengajuan pinjaman wajib mengetahui apa saja yang perlu dilampirkan kepada pihak BPR guna sebagai data diri dan bagaimana teknis pinjaman serta pelunasan kewajiban apabila permohonan pinjaman diterima oleh pihak BPR. Apabila terdapat nasabah yang belum mengetahui terkait prosedur permohonan pinjaman, maka pihak BPR akan memberikan instruksi dan persyaratan terlebih dahulu guna meminimalisir kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan membuat calon nasabah yakin akan keputusan yang akan diambil. Peneliti menilai prosedur yang ditetapkan oleh pihak BPR sangat rinci dan waspada agar pinjaman yang diberikan kepada debitur dapat digunakan sebagaimana yang telah diajukan dan mampu untuk melaksanakan kewajibannya juga. Namun pengawasan pasca pinjaman memiliki perbedaan pendapat antara pihak BPR dengan pihak nasabah. Pihak BPR menilai bahwa pegawai bank meninjau secara berkala kepada nasabah terkait penggunaan dana yang telah nasabah pinjam serta meninjau kelancaran usaha/kegiatan yang telah diajukan oleh nasabah. Namun pihak nasabah berpendapat bahwa peninjauan hanya terjadi sekali dalam sebulan setelah peminjaman bahkan tidak ada peninjauan lebih lanjut. Hal ini menjadi poin perhatian bagi peneliti dengan harapan pihak BPR lebih meningkatkan kualitas pelayanan tidak hanya sebelum permohonan pinjaman tetapi juga pasca pinjaman.
2. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, teknis prosedur pinjaman sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam SOP pengajuan pinjaman. Hal ini didukung oleh pernyataan pegawai yang berkaitan dengan pihak BPR dimana setiap nasabah yang ingin mengajukan pinjaman harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan sesuai SOP. Apabila nasabah/debitur belum mengetahui apa saja prosedur yang perlu diperhatikan saat ingin melakukan pinjaman, maka pihak BPR wajib untuk memberi tahu dahulu teknis terkait pinjaman dan pasca pinjaman kepada nasabah agar proses pinjaman dapat berjalan lancar dan diharapkan nasabah dapat melunasi kewajibannya sesuai kontrak perjanjian.



3. Dalam proses pelunasan tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa kendala dan kondisi dimana nasabah kesulitan dalam melunasi kewajibannya, seperti usahanya yang tidak berjalan dengan baik bahkan bangkrut ataupun factor eksternal lain yang membuat nasabah kesulitan. Apabila proses ini terjadi pada nasabah yang kesulitan dalam melunasi kewajibannya, pihak BPR tidak langsung mengambil alih jaminan/agunan yang sudah disepakati. Pihak BPR akan berusaha melakukan musyawarah dengan pihak debitur untuk meninjau apa yang menjadi penghambat debitur dalam melunasi kewajibannya. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pihak BPR apabila terjadi kredit macet yaitu dengan proses restrukturasi. Restrukturasi dapat berupa menurunkan suku bunga kredit, memperpanjang tenor, mengurangi tunggakan hingga menkonversi kredit yang ada menjadi dana penyertaan modal sementara.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan hasil analisis mekanisme pengajuan pinjaman kredit Perumda BPR Bank Kota Bogor, maka untuk kedepannya peneliti berharap pihak BPR lebih meningkatkan frekuensi peninjauan dan memperketat validasi data debitur agar dapat meminimalisir terjadinya kredit macet pada saat peminjaman berlangsung. Juga diharapkan kedepannya agar diadakanya permohonan berbasis digital agar prosedur yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lebih mudah dan memperkecil terjadinya kesalahan data. Untuk penulisan selanjutnya dapat ditinjau lebih lanjut apakah metode restrukturasi yang telah dilakukan oleh pihak BPR dapat berjalan dengan efektif dalam menanggulangi terjadinya kredit macet.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Purba, Ramen, Dkk. 2021. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Agus, S., & Irfani. (2020). *Manajemen Keuangan Dan Bisnis* (Bernadine (ed.)). PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA. [www.gpu.id](http://www.gpu.id)
- Agustina Shinta. 2018. *Manajemen Pemasaran* : UB Press.
- Ajuha, B. (2017). *Dasar – Dasar Perbankan*. Penerbit: PT. Bumi Aksara.
- Ajuha, B. (2017). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Annur, M. F., & Hermansyah. (2020). Analisis Kesulitan Mahasiswa Pendidikan Matematika dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi COVID-19. *Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 11(2), 195-201.
- AS. Moenir, (2001), *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Asthar, Angelia Veby. (2021). Mekanisme Pengajuan Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada PT Infinity Plus Solution Authorized CIMB Niaga. *STIESIA Journal*.
- Aulia, R. W., Farida, A., & Iltiham, M. F. (2019). Analisis Perhitungan dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Kota Mojokerto KCP Pandaan). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 221-236.
- DJKN. 2019. Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19. Tersedia di: [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) [Diakses 18 November 2022]
- Gusriani, Misye. Hendrik. Hamid, Hamdi. (2016). Mekanisme Pemberian Kredit Bank BRI Konvensional Kantor Cabang Pekanbaru Pada Usaha Perikanan di Pekanbaru. Volume 3. Nomor 1 Edisi Juni 2016
- Handini, S., & Astawinetu, E. D. 2020. *Teori Portofolio dan Pasar Modal Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Harahap, Isnaini. (2019). *Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018*. Jurnal Akuntansi Syariah.
- Hidayati, D. F. (2021). Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pengajuan Kredit Cepat Aman pada Pegadaian UPC Kalisat Kabupaten Jember (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syari'ah).
- Indradewi, I. G. A. A. D., & Wibawa, I. G. P. (2021). Analisis dan Desain Sistem Informasi Pengajuan dan Monitoring Keuangan Kelurahan Berorientasi Obyek pada Kecamatan Denpasar Selatan. *Jurnal Krisnadana*, 1(1), 1-12.

- Kariyoto. 2018. *Manajemen Keuangan Konsep dan Implementasi*, Cetakan.Pertama. Malang: UB press.
- Kasmir. (2009). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta.
- . (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, Anthusian Indra. (2015). *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Mengapa Suku Bunga BPR Lebih Tinggi Dibanding Bank Umum. 2020. Tersedia di <https://finansial.bisnis.com/read/20200305/90/1209858/mengapa-suku-bunga-bpr-lebih-tinggi-dibanding-bank-umum-> [Diakses pada 22 November 2022]
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musthafa. (2017). *Manajemen Keuangan – Prof. Dr. H. Musthafa, S.E., M.M.* Penerbit: Andi.
- Perbedaan Bank Umum dan BPR. 2020. Tersedia di: <https://blog.bankneocommerce.co.id/artikel/perbedaan-bank-umum-dan-bpr/> [Diakses pada 22 November 2022]
- RIJADI, P. K., & HAKIH, W. A. (2021). ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MEKANISME PENGAJUAN PRODUK PEMBIAYAAN GRIYA RUMAH BARU DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA THAMRIN–JAKARTA PUSAT. *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 61-70.
- Sakdiyah.2018.Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar.*Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi* 6(1):28.
- Sesiady, N, dkk.2018.Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern. *Jurnal Administrasi Bisnis* 61(1):182.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemern*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarna, A, Et Al. (2019). *Pernanan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak*. *Jurnal Keuangan*, 120.

Thomas Suyatno, dkk, 1998. Kelembagaan Perbankan (Edisi Kedua), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Widayanti. Riadi, Eko. Alexandro, Rinto. Erang, Dehen. Putri, Windi Utami. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada BRI Palangka Raya Unit Yos Sudarso. Volume 3. Nomor 1. Halaman 20-30.

Widiasih, R. A. (2018). Analisis Prosedur Pengajuan Dan Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Dplk) Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Magelang (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).

Yulisari, Et Al. (2021). *Analisis Sistem dan Prosedur Penyaluran Kredit pada BPR Husamitra Cabang Daya*. Jurnal Economic Bosowa, 31.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Cahya Maharani  
Alamat : Kp. Momonot RT.01 RW.11 No.72, Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 28 Oktober 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan

- SD : SD Negeri Tlajung Udik 01
- SMP : SMP Negeri 1 Cileungsi
- SMA : SMA Negeri 1 Klapanunggal
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juni 2023  
Peneliti,

(Dwi Cahya Maharani)

# LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Nomor Wawancara	
Narasumber	
Jenis Wawancara	
Hari/Tanggal	
Lokasi	
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	<input type="checkbox"/> Bogor <input type="checkbox"/> Luar Kota Bogor
<p>1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?</p>	
<p>2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?</p>	
<p>3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> <p>Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
<p>4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?</p>	
<p>5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?</p>	
<p>6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?</p>	
<p>7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?</p>	
<p>8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?</p>	

<p>9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?</p>
<p>10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?</p>
<p>11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%</p>



## Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Nomor Wawancara	1
Narasumber	Nasabah Swasta
Jenis Wawancara	Wawancara Terstruktur
Hari/Tanggal	Kamis, 11/04/2023
Lokasi	Perumda BPR Bank Kota Bogor
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	Luar Kota Bogor
1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	
Penting	
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	
Iya, mengetahui	
3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
Betul, apa yang saya ketahui dengan yang dijelaskan sesuai dengan prosedur	
4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?	
Iya, mereka menjelaskan terlebih dahulu sebelum proses permohonan	
5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?	
Iya, sebagai bagian dari prosedur	

6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?
Iya, terdapat kunjungan dan <i>survey</i>
7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?
Betul
8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?
Benar, sebagai pemberitahuan
9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?
Benar
10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Sudah Sesuai dengan prosedur yang berlaku
11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%
Dengan Melakukan Restrukturasi

Nomor Wawancara	2
Narasumber	Analisis Kredit
Jenis Wawancara	Wawancara Terstruktur
Hari/Tanggal	Kamis,11/04/2023
Lokasi	Perumda BMR Bank Kota Bogor
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	
1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	
Sangat Penting	
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	
Saya mengetahui itu	
3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
Ya, sudah sesuai	
4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?	
Iya, menjelaskan dulu	
5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?	
iya	

6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?
Ada kunjungan
7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?
Tidak, pihak BPR hanya berkunjung sekali, selama tidak telat bayar maka tidak akan dikunjungi
8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?
Iya
9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?
langkah awal sebelum ayda di analisa kembali apakah debitur cukup potensial untuk diberikan restrukturisasi
10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Iya, sudah sesuai
11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%
dengan cara melakukan penagihan secara rutin dan persuasif terhdap nasabah dan berikan solusinsolusi terbaik untuk penanganannya

Nomor Wawancara	3
Narasumber	Nasabah PNS
Jenis Wawancara	Wawancara Terstruktur
Hari/Tanggal	Kamis/11/04/2023
Lokasi	Perumda BPR Kota Bogor
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	
1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	
Sangat Penting	
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	
Tidak tau	
3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
Betul, sesuai dengan apa yang dijelaskan	
4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?	
Iya, mereka menjelaskan terlebih dahulu	
5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?	
Benar	

6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?
Benar
7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?
Benar
8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?
Tidak Tahu
9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?
Benar, sesuai dengan apa yang dijelaskan pada saya
10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
sudah
11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%
Saya kurang tahu

Nomor Wawancara	4
Narasumber	Admin Kredit
Jenis Wawancara	Wawancara Terstruktur
Hari/Tanggal	Kamis, 11/04/2023
Lokasi	Perumda BPR Bank Kota Bogor
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	
1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	
Ya penting	
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	
Iya saya mengetahuinya	
3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
Ya secara global persyaratan untuk pedagang, karyawan swasta, guru sertifikasi dan PNS tidak jauh berbeda. Namun untuk pinjaman karyawan swasta menggunakan jaminan SK Karyawan tetap ditambah dengan jaminan tambahan seperti (motor/mobil/shm) Untuk pinjaman PNS jaminan berupa SK (Pangkat/Berkala/Ijazah/Taspen) tanpa jaminan tambahan Untuk Pedagang jaminan berupa SHM (Tanah/Bangunan) disertai dengan persyaratan lain seperti: surat keterangan usaha, slip pembayaran rekening listrik/air/telepon, dan pembayaran PBB	
4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?	
Ya, semua nasabah yang datang untuk meminta informasi terkait dengan kredit dijelaskan	

5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?
Betul
6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?
Betul, terdapat kunjungan namun hanya dilakukan sekali saat bulan pertama pasca pinjaman
7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?
Benar
8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?
Dalam hal debitur bermasalah, setelah keterlambatan 30 hari akan dilakukan wawancara melalui telpon untuk mengetahui kendala
9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?
Sebelum ambil alih jaminan, BPR akan melakukan musyawarah dengan debitur
10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Sudah sesuai
11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%
Melakukan pendekatan kembali dengan debitur-debitur yang macet, agar mereka mau kembali mengusahakan dan membayar kewajiban mereka.



Nomor Wawancara	5
Narasumber	Nasabah PNS
Jenis Wawancara	Wawancara Terstruktur
Hari/Tanggal	Kamis, 11/04/2023
Lokasi	Perumda BPR Bank Kota Bogor
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	
1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	
Ya, sangat penting	
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	
Iya, saya mengetahui	
3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
Benar	
4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?	
Iya menjelaskan seperti yang dijabarkan diatas	
5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?	
Betul	

6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?
Iya ada yang datang <i>survey</i>
7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?
Benar tapi hanya dilakukan dalam satu bulan pertama setelah pencairan
8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?
Iya teguran pertama dulu dilakukan penyemprotan
9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?
Iya
10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Sudah sesuai
11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%
Melakukan Restrukturasi

Nomor Wawancara	6
Narasumber	Credit Marketing
Jenis Wawancara	Wawancara Terstruktur
Hari/Tanggal	Kamis,11/04/2023
Lokasi	Perumda BPR Bank Kota Bogor
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	
1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	
Penting	
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	
Ya mengetahui	
3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
Iya betul	
4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?	
Menjelaskan sesuai pertanyaan sebelumnya	
5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?	
Iya	

6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?
Ya
7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?
Iya
8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?
Iya, berupa peringatan dan pemberitahuan
9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?
Ya
10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Sudah
11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%
Restrukturasi

Nomor Wawancara	7
Narasumber	Nasabah Swasta
Jenis Wawancara	Wawancara Terstruktur
Hari/Tanggal	Kamis, 11/04/2023
Lokasi	Perumda BPR Bank Kota Bogor
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	
1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	
Ya	
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	
Saya tidak tahu	
3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
Benar	
4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?	
Benar	
5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?	
Benar	

6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?
Benar
7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?
Benar, sesuai dengan pernyataan yang saya setuju
8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?
Iya sebagai pengingat
9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?
Benar, akan tegas dan sesuai dengan SOP yang berlaku
10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Sudah
11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%
Saya kurang tahu

Nomor Wawancara	8
Narasumber	CMO
Jenis Wawancara	Wawancara Terstruktur
Hari/Tanggal	Kamis,11/4/2023
Lokasi	Perumda BPR Bank Kota Bogor
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	
1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	
Iya penting agar berjalan lancar	
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	
mengetahui	
3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
Iya	
4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?	
Ya benar	
5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?	
Iya benar	

6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?
Iya benar, kunjungan untuk <i>survey</i> lapangan
7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?
Iya, agar dana pinjaman tidak digunakan macam-macam
8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?
Iya benar
9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?
Iya benar
10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Sudah sesuai dengan SOP yang berlaku
11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%
penagihan secara langsung ke debitur, dan proses AYDA bila mana nasabah sudah tidak ada ke sanggupuan untuk membayar



Nomor Wawancara	9
Narasumber	Analisis Kredit
Jenis Wawancara	Wawancara Terstruktur
Hari/Tanggal	Kamis, 11/04/2023
Lokasi	Perumda BPR Bank Kota Bogor
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	
1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	
Ya	
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	
Ya	
3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
YA - Khusus Sumber Dana via TUKIN	
4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?	
Ya, karena sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	
5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?	
Iya, agar data dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan	

6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?
Ya sebagai pantauan
7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?
Iya
8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?
Iya, sebagai notifikasi atas tindakan
9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?
Ya, sesuai aturan yang berlaku
10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Ya
11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%
Ssaya kurang tahu

Nomor Wawancara	10
Narasumber	Account Officer
Jenis Wawancara	Wawancara Terstruktur
Hari/Tanggal	Kamis,11/04/2023
Lokasi	Perumda BPR Bank Kota Bogor
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	
1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	
Sangat penting	
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	
Mengetahui	
3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
Benar	
4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?	
benar karena sebelum calon debitur pengajuan kredit syarat-syarat harus lengkap terlebih dahulu agar bisa diproses lebih lanjut	
5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?	
Benar, karena persyaratan yang dilengkapi untuk pengajuan kredit sebagai data bank . dan <i>survey</i> usaha untuk nasabah umkm wajib untuk dilakukan	

6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?
Benar , karena untuk mengetahui kesanggupan bayar calon debitur
7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?
Benar , karena untuk mengetahui sejak dini apakah usaha tersebut berjalan dengan baik atau mengalami penurunan
8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?
Benar
9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur? terhadap debitur menunggak ada beberapa tahapan terlebih dahulu yang dilakukan oleh bank kota bogor sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan sebelum dilakukan ambil alih jaminan atas persetujuan debitur
10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Sudah
11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%
melakukan penagihan sesuai SOP yang diterapkan di bank kota bogor

Nomor Wawancara	11
Narasumber	Customer Service
Jenis Wawancara	Wawancara Terstruktur
Hari/Tanggal	Kamis,11/04/2023
Lokasi	Perumda BPR Bank Kota Bogor
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	
1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	
Mengetahui	
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	
Iya benar	
3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
Iya benar	
4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?	
Iya	
5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?	
Iya benar	

6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?
Iya bener, tetapi untuk pinjaman UMKM atau usaha
7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?
Iya masih
8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?
Iya benar
9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?
Sementara hanya teguran dan peringatan saja blm sampai mengambil alih agunan
10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Iya
11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%
Dengan cara pengecekan kredit oleh para CMO klo pun macet pihak bank langsung menghubungi nasabah untuk menindak lanjuti kemacetannya

Nomor Wawancara	12
Narasumber	Nasabah
Jenis Wawancara	Wawancara Terstruktur
Hari/Tanggal	Kamis, 11/04/2023
Lokasi	Perumda BPR Bank Kota Bogor
Usia	<input type="checkbox"/> < 30 Tahun <input type="checkbox"/> > 30 Tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Lama Bekerja	<input type="checkbox"/> < 5 Tahun <input type="checkbox"/> > 5 Tahun
Domisili	
1. Apakah menurut Bapak/Ibu mekanisme/SOP pengajuan kredit itu penting untuk dijalankan?	
Tentu penting	
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme/ SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor?	
Iya saya mengetahuinya	
3. Apakah benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit di bank kota bogor seperti ini?	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami dan/atau Istri Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah</li> <li>5. Pas Foto Suami Istri</li> </ol> Persyaratan bagi calon debitur PNS dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kontrak/Pangkat/SK Berkala/Taspen/SK Pensiun (asli dan fotokopi)</li> <li>2. Slip gaji dan daftar tunjangan</li> <li>3. Kwitansi Potongan pinjaman lain (Koperasi, bank lain, leasing)</li> </ol>	
Betul, apa yang saya ketahui dengan apa yang dijelaskan telah sesuai	
4. Apakah benar pihak <i>Account Officer</i> atau <i>Customer Service</i> menerima calon debitur dan menjelaskan persyaratan kredit seperti diatas?	
Ya, semua nasabah yang datang akan diberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum lanjut ke masalah pengajuan	
5. Apakah benar calon debitur diharuskan mengisi formulir permohonan kredit, dilampiri fotocopy bukti diri dan kelengkapan persyaratan dan kediaman rumah/tempat usaha didatangi pihak bank untuk dilakukan survei lapangan?	
Betul	

6. Apakah benar ada kunjungan dari pihak bank yang melakukan survei lapangan dengan mengambil foto tempat tinggal atau tempat usaha, foto agunan (seperti, rumah, bangunan, kendaraan), melakukan wawancara pemohon dan keluarga pemohon, dan mengumpulkan data penghasilan serta pengeluaran bulanan baik usaha maupun keluarga calon debitur?
Betul, terdapat kunjungan namun saya hanya menerima kunjungan 1 kali setelah pengajuan
7. Apakah benar selama kontrak pinjaman Bapak/Ibu berjalan pihak bank masih melakukan pengawasan atau pengecekan kembali kebenaran penggunaan kredit yang diajukan secara berkala dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal?
Benar
8. Benarkah adanya bila debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank mengirimkan surat teguran atau surat panggilan ke alamat yang dicantumkan debitur?
Apabila nasabah terdapat kendala dalam memenuhi angsuran, maka akan dilakukan teguran dan musyawarah terlebih dahulu untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi
9. Menurut yang anda ketahui, jika debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya dan dilihat dari segi usaha atau penghasilan lainnya tidak ada potensi untuk bisa melunaskan, apakah pihak Perumda Bank Kota Bogor akan bersikap tegas dengan mengambil alih agunan yang telah menjadi jaminan pinjaman debitur?
Sebelum mengambil alih jaminan, pihak BPR akan melakukan musyawarah dengan nasabah terlebih dahulu
10. Apakah menurut Bapak/Ibu SOP pengajuan pinjaman kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Sudah sesuai
11. Sejauh informasi yang Bapak/Ibu ketahui selama ini, bagaimana cara pihak Bank Kota Bogor dalam penanganan permasalahan risiko kredit macet? Apa yang dilakukan pihak bank kota bogor untuk menekankan nilai NPL agar tidak melebihi dari batasan yang telah diatur OJK yaitu sebesar 5%
Melakukan pendekatan dan restrukturasi